

**PENGARUH INFLASI, SUBSIDI BBM,
DAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan
Program Studi Magister Manajemen**



Oleh :

**INTI NUSWANDARI
NIM 201161063**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWJIA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
J A K A R T A
2013**

Persembahan

Seseorang membutuhkan tiga hal untuk benar-benar menjadi bahagia di dunia ini. Yaitu seseorang yang dicintai, sesuatu yang dilakukan dan sesuatu yang diharapkan.

(by: Tom Codett)

Terima kasih untuk keluarga dan suami tercinta atas segala dukungan dan kasih sayangnya sehingga tesis ini bisa selesai. Buat Dewa & Rama, kalian tetap yang utama.

**PENGARUH INFLASI, SUBSIDI BBM,
DAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inti Nuswandari
NIM : 201161063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan pada program magister ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karenanya pertanggungjawabannya berada di pundak saya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk ditinjau dan menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan se⁴benar-benarnya.

Jakarta, 14 Februari 2013

Yang menyatakan,



**Inti Nuswandari
NIM 201161063**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWIJA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN**

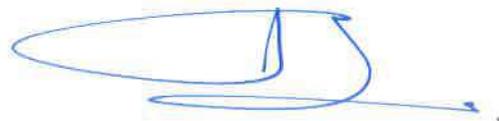
TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : Inti Nuswandari
NIM : 201161063
Program : Pasca Sarjana Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul Tesis :

**PENGARUH INFLASI, SUBSIDI BBM,
DAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

Jakarta, 14 Februari 2013

Dosen Pembimbing,



(Y. Santoso Wibowo, SE., Akt., MBF)

**PENGARUH INFLASI, SUBSIDI BBM,
DAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

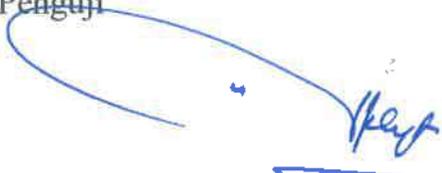
Oleh :

INTI NUSWANDARI
NIM: 201161063

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 4 Maret 2013
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima sebagai Tesis
Program Pascasarjana Magister Manajemen

Susunan Dewan Penguji

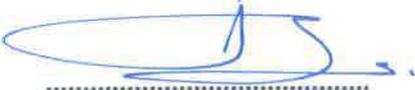
1. **Dr. Heru Mulyanto, SE, MM**
Ketua


Tanggal

2. **Dr. Suyanto, SE, MM, M.Ak**
Anggota


Tanggal 30/4/13.

3. **Y. Santoso Wibowo, SE, Akt, MBF**
Anggota


Tanggal

Mengesahkan
Ketua Program MM,


Dr. Heru Mulyanto, SE, MM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Inti Nuswandari, SE.
Telp. 0815 99 28 28 4
Email: inti_endratmo@yahoo.com

DATA PRIBADI

Tempat/ tgl lahir : Ngawi, 19 Juni 1975
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Perum. Antariksa Permai, Blok C2/8, RT. 004/20
Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor, 16963.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2011 – 2013 : S2/Manajemen Keuangan di STIE IPWIJA Jakarta
1994 – 1999 : S1/Ekonomi/ Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Suƒakarta
1990 – 1993 : SMA Negeri 39, Jakarta
1987 – 1990 : SMP Negeri 2 Cimanggis, Bogor, Jawa Barat
1981 – 1987 : SD Negeri 1 di Ngawi, Jawa Timur

PENGALAMAN KERJA

1999-2001 : Accounting staff Di Yayasan AIDS Indonesia, Jakarta
2001-2002 : Purchasing staff di PT.Skycamping Indonesia, Bogor
2002-2003 : Secretary & Adm. Staff di Kiddie Planet School, Jakarta
2003-2007 : Secretary & Finance/Adm. supervisor di Lakeside Montessori School, Jakarta
2008-2009 : Asisten Pribadi Anggota DPR RI periode 2004 – 2009
2009-skrng : Staff Ahli Anggota DPR RI periode 2009-2014

ABSTRAK

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis **Pengaruh Inflasi, Subsidi BBM, dan Anggaran Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**. Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi, subsidi BBM merupakan salah satu komponen biaya pemerintah, demikian pula anggaran infrastruktur yang juga komponen pengeluaran pemerintah untuk menunjang percepatan pembangunan.

Dari hasil penelitian terdapat pengaruh secara simultan atas inflasi, subsidi BBM dan anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya F hitung = 8,435, dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut < 0,05, yang berarti bahwa faktor-faktor yang berupa: Inflasi, Subsidi BBM dan Anggaran Infrastruktur, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variable Independen: Inflasi, Subsidi BBM, Anggaran Infrastruktur, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi terbukti. Hasil analisis secara parsial menghasilkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Variabel Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel Subsidi BBM dan anggaran infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan terkait perekonomian Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini sebagai penyelenggara negara diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengendalian inflasi, kebijakan subsidi serta kebijakan anggaran harus terus didorong ke arah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kata Kunci: Inflasi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

There are several factors that can affect the rate of economic growth in Indonesia. This research is to analyze the effect of inflation, fuel subsidy, and the Infrastructure budget against the economic growth of Indonesia. Inflation is one of the macroeconomic indicators, the fuel subsidy is one component of government cost, as well as the infrastructure budget also components of government spending to support accelerated development.

From the results of the research, there is a simultaneous effect of inflation, fuel subsidies and infrastructure budget to the level of economic growth in Indonesia. The magnitude of F count = 8,435 with the significant value is 0,000. Significant value was <0.05 , which means that the variable factors: inflation, fuel subsidies and infrastructure budget, are jointly have a significant effect on the economic growth. Based on the analysis, it can be concluded that the hypothesis that which states that the independent variables: inflation, fuel subsidy, Infrastructure Budget, are jointly have a significant effect on economic growth is proved. The result of the partially analysis states that all the independent variables affect the dependent variable (Economic Growth) significantly. Variable Inflation has a negative impact on economic growth, variable fuel subsidies and infrastructure budget have positive impact significantly to the economic growth.

Based on the results of this study are expected to be a reference in making policies related to Indonesia's economy. The government, in this case as a state officials are expected to make policies that encourage increased economic growth which has implications for the welfare of society. Inflation control policy, subsidy policy and budget policy should continue to be driven to the achievement of sustainable economic growth.

Keywords: Inflation, Fuel, Infrastructure, Economic Growth

KATA PENGANTAR

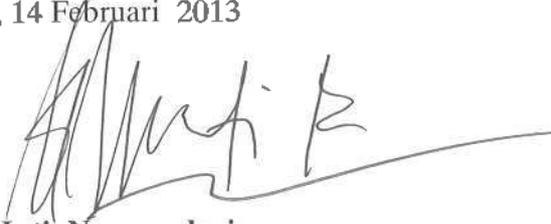
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **PENGARUH INFLASI, SUBSIDI BBM, DAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA** . Penyusunan tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Magister Manajemen pada STIE IPWIJA Jakarta. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Y. Santoso Wibowo, SE., Akt., MBF selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
2. Bapak Dr. Heru Mulyanto, SE.,MM selaku Ketua Program MM STIE IPWIJA
3. Bapak Dr. Suyanto, SE., MM., M.Ak selaku Ketua STIE IPWIJA
4. Ibu Hj. Anna Mu'awanah, SE., MH. Anggota DPR RI periode 2009-2014, atas perkenannya untuk melanjutkan studi selama menjadi staf beliau.
5. Teman-teman MM STIE IPWIJA angkatan 49, atas segala dukungan dan semangatnya
6. Segenap Civitas Akademika STIE IPWIJA
7. Keluarga tercinta, specially Dewa dan Rama atas kerelaan sebagian waktunya untuk 'bund kuliah.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini., yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Jakarta, 14 Februari 2013



Inti Nuswandari

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2005-2010	2
Tabel 1.2	Produksi Minyak Bumi Tahun 2004 – 2012	4
Tabel 1.3	Realisasi Anggaran Infrastruktur 2005-2012	6
Tabel 1.4	Peringkat Pembangunan Infrastruktur	7
Tabel 3.1	Definisi Variabel Bebas & Terikat	47
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5 (2010-2011)..	63
Tabel 4.2	Data Input Statistik	64
Tabel 4.3	Tabel Korelasi Antar Variabel	66
Tabel 4.4	Hasil Analisis Korelasi Faktor-faktor Independen	68
Tabel 4.5	Hasil Analisis Pengaruh Bersama factor-faktor independen	68
Tabel 4.6	Hasil Analisis Pengaruh masing-masing factor independen	69
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas	73
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Solow Model	29
Gambar 2.2	Dampak Kemajuan Teknologi	30
Gambar 2.3	Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan produktifitas	37
Gambar 2.4	Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen	39
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Subsidi BBM dari Tahun 2005-2011.....	19
Grafik 4.1	Perkembangan Pembiayaan APBN tahun 2005-2011	59
Grafik 4.2	Grafik Normal Probability Plots.....	74
Grafik 4.3	Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Inflasi Tiap Kuartal tahun 2005-2012.....	91
Lampiran 2	Data Realisasi Subidi BBM tahun 2005-2012	92
Lampiran 3	Data Realisasi Anggaran Infrastruktur tahun 2005-2012	93
Lampiran 4	Rincian Anggaran Infrastruktur tahun 2005-2012	94
Lampiran 5	Data Pertumbuhan Ekonomi tiap kuartal tahun 2005-2012	95

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Teori	12
a. Pengertian inflasi	12
b. Pengertian Subsidi BBM	17
c. Pengertian Anggaran Infrastruktur	19
d. Pertumbuhan Ekonomi & Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	24
e. Gambaran Umum APBN	42
2.2. Penelitian Terdahulu	44
2.3. Kerangka Pemikiran	45
2.4. Hipotesis	46

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1.	Definisi Konseptual & Operasional Variabel	47
3.2.	Model Penelitian	48
3.3.	Pengumpulan Data	48
3.4.	Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1.	Deskripsi Obyek Penelitian.....	56
4.2.	Pembiayaan Anggaran	58
4.3.	Deskripsi Variabel	60
4.4.	Hasil Statistik	64
4.5.	Implikasi Manajerial	77
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1.	Kesimpulan	86
5.2.	Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu titik awal kelahiran ilmu ekonomi makro adalah adanya permasalahan ekonomi jangka pendek yang tidak dapat diatasi oleh teori ekonomi klasik. Masalah jangka pendek ekonomi tersebut yaitu inflasi, pengangguran dan neraca pembayaran. Laju inflasi di Indonesia sangat fluktuatif. Perkembangan laju inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional. Volatilitas harga komoditas tersebut di pasar internasional muncul karena adanya gangguan produksi di negara-negara produsen sebagai dampak anomali iklim, bencana alam dan konflik geopolitik. Adanya gangguan produksi tersebut mendorong peningkatan tekanan output gap di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri.

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya

baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi.

Tabel 1.1
Tingkat Inflasi di Indonesia,
Tahun 2005-2012

BULAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jan	1.43	1.36	1.04	1.77	-0.07	0.84	0.89	0.76
Feb	-0.17	0.58	0.62	0.65	0.21	0.30	0.13	0.05
Mar	1.91	0.03	0.24	0.95	0.22	-0.14	-0.32	0.07
Apr	0.34	0.05	-0.16	0.57	-0.31	0.15	-0.31	0.21
Mei	0.21	0.37	0.10	1.41	0.04	0.29	0.12	0.07
Jun	0.50	0.45	0.23	2.46	0.11	0.97	0.55	0.62
Jul	0.78	0.45	0.72	1.37	0.45	1.57	0.67	0.70
Agt	0.55	0.33	0.75	0.51	0.56	0.76	0.93	0.95
Sep	0.69	0.38	0.80	0.97	1.05	0.44	0.27	0.01
Okt	8.70	0.86	0.79	0.45	0.19	0.06	-0.12	0.16
Nov	1.31	0.34	0.18	0.12	-0.03	0.60	0.34	0.07
Des	-0.04	1.21	1.10	-0.04	0.33	0.92	0.57	0.54
Tahunan	17.11	6.60	6.59	11.06	2.78	6.96	3.79	4.30

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN, selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis finansial/ekonomi 1997/1998. Subsidi ini pada prinsipnya adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi

masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk membeli suatu barang dan jasa yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Dengan subsidi, harga barang dan jasa menjadi lebih murah dari nilai pasarnya (Tim Sosialisasi Kebijakan Subsidi BBM 2001, DESDM, 2001).

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan harga BBM membawa dampak yang cukup besar dalam perekonomian. Hasil penelitian IMF (2001) menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan membawa dampak signifikan bagi pendapatan nasional, dan sebaliknya penurunan harga minyak justru tidak akan berdampak pada kenaikan output nasional. Kenaikan harga minyak akan berakibat negatif bagi perekonomian dalam negeri.

Semakin besar konsumsi BBM, maka semakin besar pula subsidi yang harus diberikan. Di beberapa negara berkembang, energi terutama BBM dan gas (fossil fuels) merupakan komoditas strategis yang mendapatkan perlakuan istimewa melalui pemberian subsidi. Secara umum, pemberian subsidi ini bertujuan untuk menguatkan permintaan dalam negeri (domestic demand) akan barang tersebut yang merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Banyak kebijakan subsidi yang didorong oleh tujuan ekonomi dan sosial seperti upaya untuk menstimulasikan pembangunan perekonomian, untuk mendukung kelompok miskin ataupun guna menyediakan akses bagi *basic living condition*.

Jumlah pemberian subsidi tiap tahunnya semakin meningkat. Kenaikan besaran subsidi didorong oleh dua faktor utama yaitu kenaikan konsumsi dan kenaikan harga patokan BBM. Kuantitas BBM yang keluar dari selang Pertamina juga semakin meningkat setiap tahun karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Berapa pun kenaikan konsumsi, pemerintah harus memenuhi dan menjamin ketersediaan BBM. Kewajiban ini merupakan implikasi Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001. Di sisi lain, harga patokan BBM dipengaruhi oleh harga minyak internasional. Kenaikan harga minyak internasional akan meningkatkan harga patokan sehingga meningkatkan besaran subsidi BBM.

Kenaikan besaran subsidi ini tidak berbanding lurus dengan produksi minyak bumi di Indonesia. Produksi minyak bumi cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Produksi Minyak Bumi tahun 2004 - 2012
(Ribuan Barel)

TAHUN	MINYAK BUMI	KONDENSAT	JUMLAH
2004	353.945	46.541	400.486
2005	341.203	46.450	387.654
2006	322.350	44.699	367.050
2007	305.137	43.211	348.348
2008	312.484	45.016	357.500
2009	301.663	44.650	346.313
2010	300.872	43.965	344.836
2011	289.899	39.350	329.249
2012 *	143.654	19.979	163.633

Sumber: Ditjen Migas, diolah Pusdatin
Keterangan : * Data Semester 1 th 2012

Tentang anggaran infrastruktur, jika memang peran infrastruktur penting, tentu negara-negara yang ingin memajukan perekonomiannya akan menginvestasikan sebagian (besar) dari anggarannya untuk membangun sarana infrastruktur seperti jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik dan lain-lain dimana kesemuanya itu merupakan alat vital proses pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai literatur ekonomi antara lain Rotner (1983) dan Aschauer (1989) dalam Yoshino dan Nakahigashi (2000) menemukan bahwa pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengentasan penduduk miskin secara berkelanjutan, melalui intervensi dalam bentuk belanja pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jembatan non-tol, serta waduk dan sistem irigasi (pertanian) merupakan contoh utama dari infrastruktur sebagai barang public (*public goods*) yang pemakaiannya tidak dikenai biaya dan semua orang bisa menggunakannya (*non-excludable*). Sementara infrastruktur seperti jalan tol, telepon, listrik, gas yang penggunaannya harus membayar dengan tarif tertentu (*excludable*), pengadaan dan pengelolaannya dapat dilakukan sepenuhnya oleh sektor swasta. Lalu bagaimana anggaran dari pemerintah untuk infrastruktur? Berikut tabel komponen anggaran infrastruktur (data realisasi) dari tahun 2005-2012 .

Tabel. 1.3
Realisasi Anggaran Untuk Fungsi Infrastruktur pada APBN
(miliar rupiah)

APBN (Tahun)	APBN (Miliar Rupiah)	Anggaran Infrastruktur (Miliar Rupiah)	Rasio terhadap APBN (%)	Rasio terhadap PDB (%)
2005	517.517,6	26.114,2	5,04	0,96
2006	699.099,2	54.003,6	7,72	1,62
2007	752.373,3	59.814,4	7,95	1,51
2008	989.493,7	78.657,2	7,95	1,59
2009	937.382,0	91.344,4	9,74	1,63
2010	1.056.510,3	99.370,9	9,41	1,55
2011	1.320.751,3	125.622,8	11,49	1,69
2012*	1.435.406,7	161.472,3	11,25	1,96

Sumber: Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI (diolah)

*2012: Masih APBN

Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan sebagian terbesar dalam bentuk belanja (spending) dan sebagian dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit, penyertaan modal pada BUMN, serta penjaminan/kontijensi. Bila dibandingkan dengan anggaran pendidikan, anggaran infrastruktur memang masih jauh. Sejak krisis 1998, pembangunan infrastruktur berkurang drastis dan hingga kinipun berjalan lambat, terlebih bila dibandingkan dengan negara-negara sekawasan. Di Cina, infrastruktur menjadi kunci dari perekonomian. Pembangunan infrastruktur telah memberikan tiga manfaat besar bagi Cina. *Pertama*, infrastruktur telah meningkatkan fasilitas produksi dan menstimulasi aktivitas ekonomi. *Kedua*, pembangunan tersebut telah mengurangi biaya transaksi dan biaya transportasi yang berdampak pada peningkatan daya saing. *Ketiga*, pembangunan infrastruktur telah membuka akses kesempatan kerja bagi golongan bawah.

Berkaca dari pengalaman Cina, infrastruktur tentu juga menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Indonesia membutuhkan *Milestone* dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Bahkan dari dua tetangga sejawat (Malaysia dan Thailand) pun jauh tertinggal, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Peringkat Pembangunan Infrastruktur

2010-2011	Indonesia	Malaysia	Philippines	Thailand	China
Quality of overall Infrastructure	90	27	113	46	72
Quality of roads	84	21	114	36	53
Quality of railroad infrastructure	56	20	97	57	27
Quality of port infrastructure	96	19	131	43	67
Quality of air transport infrastructure	69	29	112	28	79
Available airlines seat kilometres	21	22	28	16	2
Quality of electricity supply	97	40	101	42	52
Fixed telephone lines	82	80	106	93	57
Mobile telephone subscription	98	47	88	32	111

*Sumber: Warta Anggaran Edisi 24/2012, Ditjen Anggaran Kemenkeu ;
(dari Global Competitive Report)*

Salah satu penyebab utama lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia karena rendahnya pengeluaran infrastruktur. Persentase pengeluaran infrastruktur Indonesia terhadap PDB sempat mendekati double digit di tahun 1995. Namun angka tersebut terus menurun. Hal ini kebalikan dengan kondisi

pengeluaran Infrastruktur di Cina yang sempat hanya 5,7%. Namun terus tumbuh sampai level double digit.

Sampai sejauh ini terobosan dalam meningkatkan pengeluaran infrastruktur di Indonesia terus dilakukan. Dimulai dari *Indonesia Infrastructure summit* di tahun 2005. Pemerintah berupaya menggaet peran serta BUMN, swasta nasional dan investasi luar negeri dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Peran tersebut diharapkan dapat meningkatkan akselerasi dalam pembangunan infrastruktur yang selama ini ditopang APBN.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh Inflasi, Subsidi BBM dan Anggaran Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian sebelumnya belum ada yang mencermati pengaruh Inflasi, Subsidi BBM dan Anggaran infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama, khususnya di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan inflasi, subsidi BBM, dan anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial atas inflasi, subsidi BBM, dan anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diperinci tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan atas inflasi, subsidi BBM dan anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial atas inflasi, subsidi BBM dan pembangunan infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat ilmiah, sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, mengenai tingkat pengaruh variabel-variabel bebas yang diteliti ini yaitu pengaruh secara simultan dan parsial atas inflasi, subsidi BBM dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai masukan bagi pemerintah, dalam pertimbangan pelaksanaan kebijakan analisis keuangan, khususnya mengenai kebijakan terkait inflasi, subsidi BBM dan anggaran infrastruktur,
 - b. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh variabel bebas yang diteliti ini yaitu pengaruh secara simultan dan

parsial antara inflasi, subsidi BBM dan anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini akan disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri atas kajian literatur – literatur mengenai Inflasi, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Anggaran Infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada bab ini juga menerangkan tentang kerangka penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai, Obyek Penelitian, perkembangan Kementerian Keuangan, karakteristik Kementerian Keuangan, Harapan yang Homogen atas Implikasi Informasi yang Tersedia, Operasionalisasi Variabel Penelitian, Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri atas Gambaran umum perekonomian Indonesia, Pengujian Normalitas Instrumen Penelitian, Penentuan koefisien korelasi pearson antar variabel, Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang menyimpulkan hasil penelitian, dan saran yang berisikan tentang apa yang perlu dilakukan dengan adanya kesimpulan yang didapat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas, mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan hari-hari besar), atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

Ada beberapa definisi inflasi yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi di antaranya adalah :

1. A.P. Lerner : Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan.
2. G. Cowt Hrey : Inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun terus-menerus dan harga naik terus.
3. Hawtry : Inflasi adalah suatu keadaan karena terlalu banyak uang beredar.

Macam-macam Inflasi dibedakan menjadi empat:

1. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun.
2. Inflasi sedang, terjadi apabila kenaikan harga berada di antara 10%-30% setahun

3. Infasi berat terjadi apabila kenaikan harga berada di antara 30%-100% setahun.
4. Sedangkan hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. *Demand pull inflation*.

Adalah inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. *Demand pull inflation* terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan *inflationary gap* yang menyebabkan inflasi.

2. *Cost Push Inflation*

Adalah inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada *Cost Push Inflation* tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena adanya kenaikan biaya produksi.

3. *Mix Inflation*

Merupakan gejala kombinasi antara unsur inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Pada umumnya bentuk yang sering terjadi adalah inflasi campuran, yaitu kombinasi dari kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi, dan sering sekali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

Dampak inflasi ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak inflasi tersebut antara lain:

1. Negatif:

- a.) Harga barang-barang dan jasa naik.
- b.) Nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang.
- c.) Menimbulkan tindakan spekulasi.
- d.) Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar.
- e.) Kesadaran menabung masyarakat berkurang.

2. Positif:

- a.) Peredaran / perputaran barang lebih cepat.
- b.) Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah.
- c.) Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi.
- d.) Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang, karena kenaikan pendapatan kecil.

Ada beberapa teori tentang inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

2. Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Kelompok-kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau bisa juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah, dimana hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga.

3. Teori Strukturalis

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural ini, pertumbuhan produksi barang lebih lambat dibandingkan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya

penawaran (supply) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.

Dari ketiga teori inflasi tersebut, yang sering digunakan dan cukup terkenal adalah teori kuantitas. Dalam teori kuantitas dikatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Dalam kenyataannya memang jumlah uang beredar itu sangat berpengaruh terhadap inflasi.

Dalam menyikapi inflasi agar tidak berkepanjangan dan tidak berpengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan, antara lain:

- a.) Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar.
- b.) Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:
 - 1) Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
 - 2) Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
- c.) Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- 1.) Menaikkan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi yang tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar.
- 2.) Kebijakan upah, merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikkan, karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan, sehingga akan menimbulkan inflasi.
- 3.) Pengawasan harga dan distribusi barang, ini dimaksudkan agar tidak terjadi kenaikan harga, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar.

b. Pengertian Subsidi BBM

BBM (Bahan Bakar Minyak): adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinen) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, light sulfur wax residue (LSWR) dan

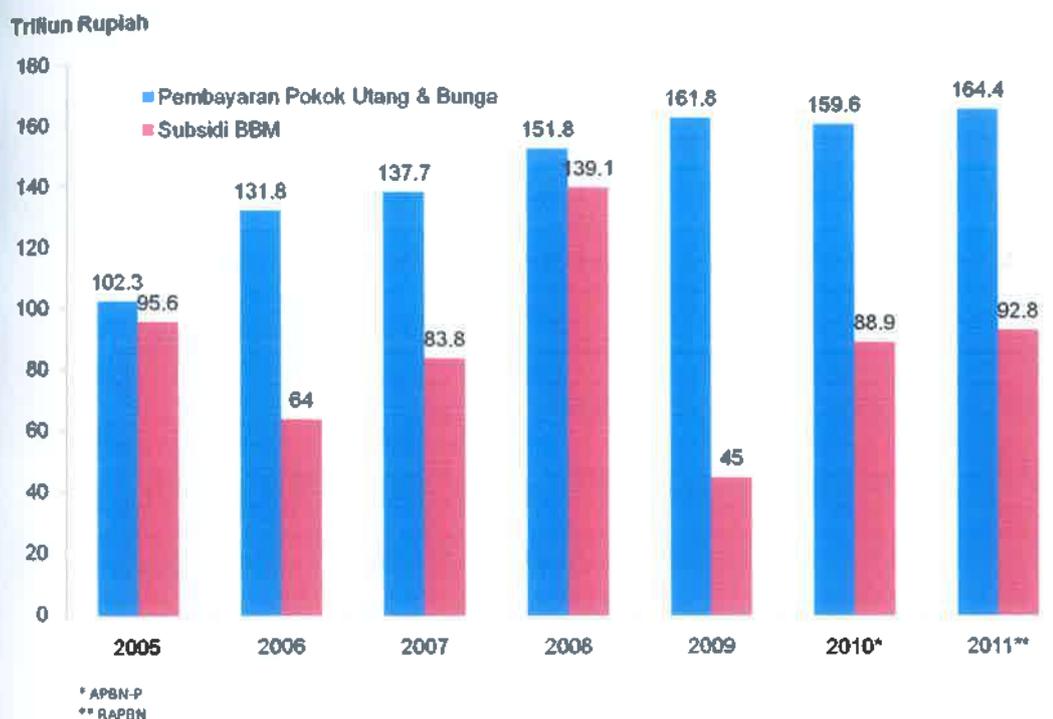
aspal. Subsidi BBM merupakan salah satu dari subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah. Umumnya subsidi energi didefinisikan sebagai “berbagai bentuk tindakan pemerintah yang bertujuan menurunkan biaya produksi energi, meningkatkan pendapatan produsen energi atau mengurangi biaya yang dibayar oleh konsumen energi” (IEA et al. 2000). Subsidi energi dibagi menjadi dua kategori; subsidi konsumen, yaitu subsidi yang dirancang untuk mengurangi biaya konsumsi energi, dan subsidi produsen yaitu subsidi yang bertujuan mendukung produksi domestik (Burniaux et al. 2009, dalam Ellis, 2010)

Dalam RAPBN dan Nota Keuangan yang setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah menyebutkan bahwa subsidi BBM adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dan tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut.

Para pembuat kebijakan sering membenarkan pemberian subsidi energi dengan alasan bahwa hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menjamin keamanan pasokan energi. Indonesia menggunakan mekanisme subsidi guna menekan harga eceran bahan bakar sejak beberapa decade lalu. Pada era 1980-an, ketika produksi minyak Indonesia lebih tinggi dibanding saat ini, subsidi bahan bakar lebih terjangkau, meskipun hal ini banyak menuai kritik dengan

alasan subsidi energi mengganggu sistem perekonomian secara keseluruhan. Ketika harga minyak dunia meningkat pada tahun 2005, pemerintah menghabiskan 24 persen dari pengeluaran totalnya untuk subsidi, dan dari jumlah tersebut, 90 persennya dihabiskan untuk produk-produk bahan bakar (World Bank, 2007).

Grafik 2.1
Subsidi BBM dari tahun 2005-2011



Sumber: Kementerian Keuangan

c. Pengertian Anggaran Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala sesuatu sarana dasar yang dibutuhkan agar suatu perekonomian atau masyarakat dapat berfungsi. Infrastruktur

dapat dibedakan sebagai infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik disebut juga '*hard infrastructure*', adalah struktur fisik adalah struktur fisik sarana dan prasarana yang dapat disentuh (*tangible*) seperti jembatan-jembatan, pelabuhan, jalan, jaringan listrik; sedangkan infrastruktur dalam pengertian nonfisik mencakup infrastruktur yang tidak dapat disentuh (*intangible*) yang mendukung pembangunan dan beroperasinya infrastruktur fisik, seperti peraturan, perundangan, system dan prosedur, serta mekanisme tata kelola, transparansi, akuntabilitas dalam pembiayaan dan pengadaannya (Bhattacharyay 2009). Infrastruktur non fisik disebut juga sebagai '*soft infrastructure*' mencakup system keuangan dan system hokum (Wikipedia). Pada perkembangannya, kemudian kata infrastruktur lebih sering dimaksudkan sebagai infrastruktur ekonomi dan fisik.

Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas- fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan- pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud.

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga,

telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).

2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The World bank (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan

utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia. Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Peningkatan anggaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pemakaian anggaran tersebut.

Anggaran infrastruktur merupakan alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah di dalam APBN untuk keperluan pembangunan infrastruktur melalui beberapa kementerian/lembaga yang ada. Total seluruh anggaran infrastruktur terdiri atas beberapa komponen, yaitu; belanja infrastruktur (Belanja Kementerian/Lembaga dan Belanja Non Kementerian/Lembaga), Pemberian kredit/pinjaman, Penyertaan modal,

dan Pinjaman/kontijensi. Anggaran infrastruktur dalam APBN dikompilasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya mencakup belanja negara, namun juga mencakup pembiayaan anggaran. Untuk belanja pemerintah pusat, anggaran infrastruktur dapat berasal dari belanja pemerintah pusat, baik belanja melalui kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L, sementara untuk transfer ke daerah, anggaran infrastruktur dapat berasal dari dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur. Sementara untuk pos pembiayaan anggaran, pengeluaran infrastruktur dapat berupa investasi pemerintah untuk infrastruktur, dana bergulir pengadaan tanah, dan penyertaan modal negara baik untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Peran infrastruktur dalam perekonomian mulai populer antara lain sebagaimana terlihat dalam sejarah Amerika Serikat saat dirintis dan dibangunnya jaringan kereta api dan telekomunikasi (pos dan telegram), pada awal abad ke-20. Melesatnya perkembangan ekonomi Jepang, Korea Selatan, dan Singapura dari semula negara berkembang menjadi negara maju, juga didukung oleh pembangunan infrastruktur yang tidak tanggung-tanggung (WG Huff, 1995; Atkinson et al, 2009). Untuk contoh paling mutakhir, pesatnya perkembangan ekonomi Cina yang juga difasilitasi oleh pembangunan jembatan-jembatan, pelabuhan, dan energi listrik secara massif di tahun 1980-an (Yoshimo dan Nakahigashi 2000;

Sahoo, 2010), yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari yang sudah dibangun mulai 1876 semasa Dinasti Qing (Wikipedia).

Berbagai kajian (antara lain Aschauer 1989; Worl Bank 1994, Calderon dan Serven 2003; Estache 2006 dalam Sahoo, Dash, dan Nataraj 2010) membuktikan bahwa infrastruktur mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian, dan sebaliknya berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur yang lebih berkualitas. Mengingat fungsinya, peran infrastruktur dalam perekonomian sangatlah vital. Dari lintasan sejarah negara-negara yang kini disebut sebagai negara maju, serta negara-negara yang dijuluki *the emerging markets* dapat diambil pelajaran bahwa infrastruktur berperan fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

d. Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan-perubahan yang prinsip mencakup perubahan struktur produksi maupun pengeluaran, perubahan sikap dan perubahan kelembagaan.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Pembangunan ekonomi mencakup juga kemajuan-kemajuan yang lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Perkembangan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Todaro (2003) mendefinisikan pembangunan sebagai pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*). $Development = Growth + Changes$.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus

melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. (Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2004).

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan atau memperbaiki kesejahteraan (standar hidup) rakyat. Pada awalnya pembangunan ekonomi akan memperbaiki kinerja ekonomi yaitu

pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dan stabil, membaiknya stabilitas harga umum dan menurunnya tingkat pengangguran. Perbaikan kinerja ekonomi terutama disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi akibat meningkatnya stok barang modal, meningkatnya kualitas SDM dan penggunaan teknologi yang lebih tinggi, serta perbaikan manajemen. Perbaikan-perbaikan di atas akhirnya menyebabkan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang dapat dievaluasi dengan peningkatan pendapatan, penambahan dan perluasan kesempatan kerja yang permanen. Kemajuan-kemajuan ini akan menurunkan jumlah atau porsi penduduk miskin, membaiknya tingkat kesehatan dan harapan hidup, membaiknya tingkat pendidikan atau secara keseluruhan membaiknya kualitas sumber daya manusia.

Mankiw (2003) menyatakan bahwa dalam jangka panjang yang akan menentukan tingkat kesejahteraan suatu bangsa atau negara adalah peningkatan kapasitas produksi perekonomian daerah dan nasional. Umumnya para ahli ekonomi sependapat bahwa faktor yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan stabil adalah peningkatan penggunaan input dan peningkatan efisiensi penggunaan input.

Ada banyak model yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu perekonomian dapat tumbuh & berkembang. Berikut ini adalah uraian dua model pertumbuhan yang dianggap relevan dengan kebutuhan studi, yaitu

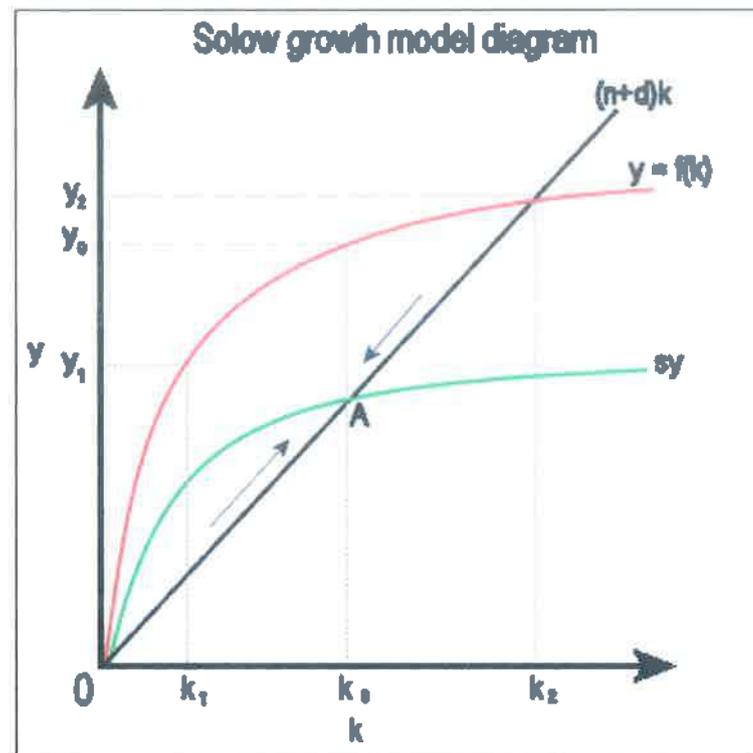
Teori Pertumbuhan Neo Klasik , Teori Pertumbuhan Harrod Domar dan Teori Pusat Pertumbuhan.

Teori Neo-klasik (Neo-Classic Theory)

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik (*neoclassical growth theory*) atau yang disebut Teori Pertumbuhan Solow (*Solow growth theory*) menekankan pentingnya penggunaan barang modal dan tenaga kerja dalam perekonomian. Suatu perekonomian akan mengalami pertumbuhan output per kapita (Y/L) bila stok barang modal per kapita (K/L) terus meningkat. Namun dengan asumsi teknologi konstan dan fungsi produksi bersifat *constan return to scale*, suatu ketika perekonomian akan stabil pada tingkat pendapatan per kapita (Y/L) tertentu. Pada waktu tertentu, ekonomi memiliki sejumlah modal, tenaga kerja, dan pengetahuan yang kombinasinya menghasilkan output. Fungsi produksi akan berbentuk: $Y(t) = F(K(t), A(t)L(t))$ dimana t adalah waktu.

Gambar 2.1 di bawah ini menggambarkan kerangka pemikiran model Solow tentang hubungan antara stok barang modal per kapita (k) dengan ouput riil per kapita atau PDB riil per kapita (y). Gambar 2.1 juga menunjukkan apa yang disebut dengan kondisi keseimbangan stabil (*steady state*).

Gambar 2.1
Solow Model



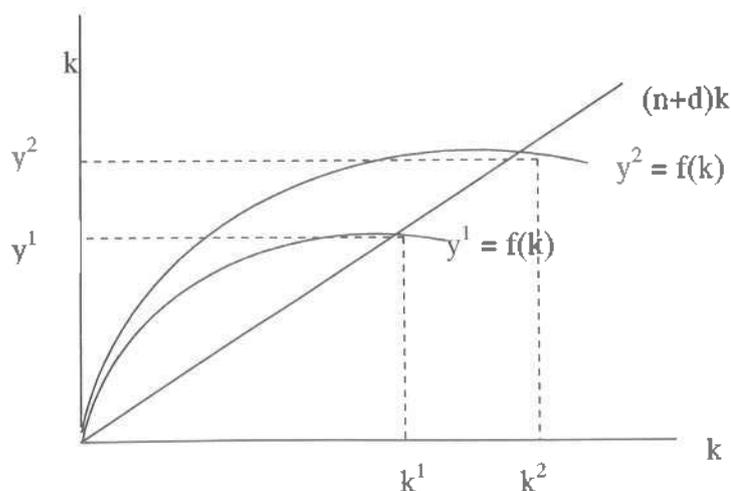
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa PDB riil per kapita (atau $y = Y/L$) ditentukan oleh stok barang modal per kapita ($k = K/L$). Garis lurus $(n+d)k$ menunjukkan kebutuhan investasi yang terdiri kebutuhan untuk depresiasi (dk) dan untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja (nd), dengan asumsi tenaga kerja tumbuh sebesar n per tahun. Kurva s menunjukkan tingkat kemampuan tabungan yang menggambarkan kemampuan akumulasi barang modal sebagai fungsi PDB riil per kapita (y).

Berdasarkan Gambar 2.1 perekonomian akan mencapai kondisi keseimbangan stabil (*steady state*) pada saat tingkat pendapatan per kapita adalah y_2 dan stok barang modal/kapita adalah k_2 . Kondisi keseimbangan stabil adalah

kondisi dimana kemampuan saving hanya dapat menutupi kebutuhan depresiasi. Dengan kata lain kondisi keseimbangan stabil adalah kondisi dimana stok barang modal per kapita (k) tidak dapat bertambah lagi, sehingga output per kapita (y) juga tidak dapat bertambah lagi. Hal ini disebabkan kemampuan tabungan hanya cukup untuk menutupi kebutuhan investasi untuk penyusutan dan penambahan tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya model Solow diperbaiki dengan membuat asumsi bahwa teknologi diasumsikan dapat berkembang namun sifatnya eksogen. Kemajuan teknologi yang sekalipun sifatnya eksojenus ini menyebabkan bahwa tenaga kerja dapat menjadi lebih produktif. Secara grafis hal ini digambarkan dengan bergesernya kurva produksi ke atas, sehingga kondisi keseimbangan stabil dapat dicapai pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi seperti yang diilustrasikan oleh gambar 2.2. di bawah ini.

Gambar 2.2
Dampak Kemajuan Teknologi



Dalam perkembangan selanjutnya model pertumbuhan Solow dikembangkan lagi dengan membuat asumsi bahwa teknologi dapat dikendalikan kemajuannya oleh perusahaan melalui kegiatan riset dan pengembangan (r&d). Perusahaan-perusahaan yang mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk riset, dalam jangka panjang akan menikmati peningkatan produktivitas karena kemajuan teknologi. Model pertumbuhan ini dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi endogenus (*endogenous growth model*). Model ini memberi penjelasan mengapa negara-negara maju (Barat dan Jepang), semakin maju sementara negara-negara berkembang tetap tertinggal. Salah satu penjelasannya adalah negara-negara maju memiliki kemampuan dan kemauan dalam melakukan riset/penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Karena menekankan pentingnya peningkatan stok barang modal dan perbaikan efisiensi, model Solow cukup baik digunakan untuk menjelaskan mengapa ada perekonomian yang kaya dengan pendapatan per kapita yang tinggi, sementara ada negara-negara yang miskin dengan pendapatan per kapita yang rendah. Implikasi dari model Solow adalah sebuah perekonomian yang terus meningkatkan pendapatan per kapitanya bukan saja bila mampu memperbaiki tingkat tabungan dan menggunakan teknologi yang lebih tinggi, tetapi juga mampu melakukan perbaikan-perbaikan efisiensi.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik, ambruknya produksi per kapita sebuah perekonomian disebabkan menurunnya stok barang modal/kapita secara drastis. Bila kualitas SDM sudah baik, perekonomian akan mampu memulihkan output/kapita (bila stok barang modal per kapita dipulihkan melalui investasi).

Mankiw (2007) mengambil contoh negara Jepang dan Jerman. Meskipun dewasa ini kedua negara itu merupakan negara adidaya secara ekonomi, namun pada tahun 1945 perekonomian kedua negara tersebut sempat carut-marut. Perang Dunia II telah menghancurkan sejumlah besar persediaan modal mereka. Namun dalam beberapa dekade setelah perang, kedua negara itu mengalami tingkat pertumbuhan paling pesat dalam catatan sejarah. Antara tahun 1948 dan 1972, output per kapita tumbuh sebesar 8,2 persen per tahun di Jepang dan 5,7 persen per tahun di Jerman, dibandingkan dengan Amerika yang hanya 2,2 persen per tahun.

Pengalaman ekonomi Jepang dan Jerman pasca perang tidak begitu mengejutkan dari sudut pandang model pertumbuhan Solow. Sekarang jika perang telah menghancurkan sebagian persediaan modal, yaitu persediaan modal merosot dari k^* ke k pada Gambar 2.1. Tidaklah mengherankan bila tingkat output langsung jatuh. Tetapi jika tingkat tabungan, bagian output yang dimasukkan ke dalam tabungan dan investasi tidak berubah, maka perekonomian akan mengalami periode pertumbuhan yang tinggi. Output tumbuh karena pada persediaan modal yang lebih rendah, maka lebih banyak modal yang ditambahkan melalui investasi daripada modal yang tergerus melalui depresiasi. Pertumbuhan yang tinggi ini terus berlanjut sampai perekonomian mendekati kondisi mapannya. Jadi, meskipun bagian persediaan modal yang hancur langsung mengurangi output, hal itu diikuti dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan normal. "Keajaiban" pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jepang dan Jerman,

sesuai dengan prediksi model Solow untuk negara-negara yang persediaan modalnya mengalami penurunan drastis akibat perang.

Teori Harod Domar

Prathama dan Mandala (2008) menyatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan teori pertumbuhan yang melihat peranan investasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output.

Dalam jangka panjang, investasi mempunyai pengaruh ganda. Di satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain investasi juga mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan menambahkan stok modal yang tersedia. Harrod menyimpulkan agar suatu ekonomi nasional selalu tumbuh dengan kapasitas produksi penuh yang disebutnya sebagai pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady-state growth*), efek permintaan yang ditimbulkan dari penambahan investasi harus selalu diimbangi oleh efek penawarannya tanpa terkecuali. Tetapi pada kenyataannya investasi dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai pengharapan yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu, oleh karena itu keseimbangan ekonomi jangka panjang yang mantap hanya dapat dicapai secara mantap pula apabila pengharapan para pengusaha stabil. Namun kemungkinan terjadinya hal itu sangat kecil, seperti yang dikemukakan oleh Joan Robinson (*golden age*).

Harrod juga mengemukakan bahwa sekali keseimbangan itu terganggu, maka gangguan itu akan mendorong ekonomi nasional menuju ke arah depresi

atau inflasi sekular. Karena itu Harrod melambangkan keseimbangan ekonomi tersebut sebagai keseimbangan mata pisau, dimana mudah sekali tergelincir dan sekali tergelincir semuanya akan menjadi hancur (keseimbangan yang tidak stabil). Teori pertumbuhan ekonomi Domar hampir mirip dengan teori Harrod walaupun ada beberapa perbedaan yang mendasar pada kedua teori itu. Perbedaan itu khususnya menyangkut mengenai tidak adanya fungsi investasi pada model Domar, sehingga investasi yang sebenarnya tidak ditentukan di dalam teorinya. Karena itu kesulitan pencapaian keseimbangan ekonomi jangka panjang yang mantap bagi Harrod, disebabkan oleh sulitnya kesamaan v dan v_r atau laju pertumbuhan yang disyaratkan dengan laju pertumbuhan natural, sedangkan bagi Domar kesulitan itu timbul karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melakukan investasi yang relatif terlalu rendah (*underinvestment*).

Dalam konsep ICOR, investasi adalah total dari pembentukan modal tetap dan stok barang yang terdiri atas gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan sebagainya. Nilai dalam investasi terdiri dari :

- a) Pembelian barang modal baru.
- b) Pembuatan/perbaikan besar terhadap barang yang sifatnya menambah umur atau meningkatkan kemampuan.
- c) Penjualan barang modal bekas.
- d) Perubahan stok.

Konsep COR ada 2, yaitu average capital-output ratio (ACOR) dan incremental capital-output ratio (ICOR). ACOR menunjukkan hubungan antara stok modal yang ada dan aliran output lancar yang dihasilkan. ICOR

menunjukkan perbandingan antara kenaikan tertentu pada stok modal (ΔK) dan kenaikan Output atau pendapatan (ΔY). Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada sektor yang teknik produksinya bersifat padat modal, COR-nya akan tinggi. Sebaliknya, sektor dengan teknik produksi padat karya, COR-nya akan rendah. Sektor-sektor seperti transportasi, telekomunikasi, perhubungan, perumahan, dan industri barang modal akan mempunyai COR sektoral yang relatif tinggi. Nilai COR yang tinggi pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh modal besar yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap output yang diinginkan. Dengan kata lain, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang menggunakan teknik produksi yang bersifat lebih pada modal dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Poles Theory)

Teori pusat pertumbuhan merupakan salah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara bersamaan. Maka dengan demikian teori pusat pertumbuhan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan, program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu.

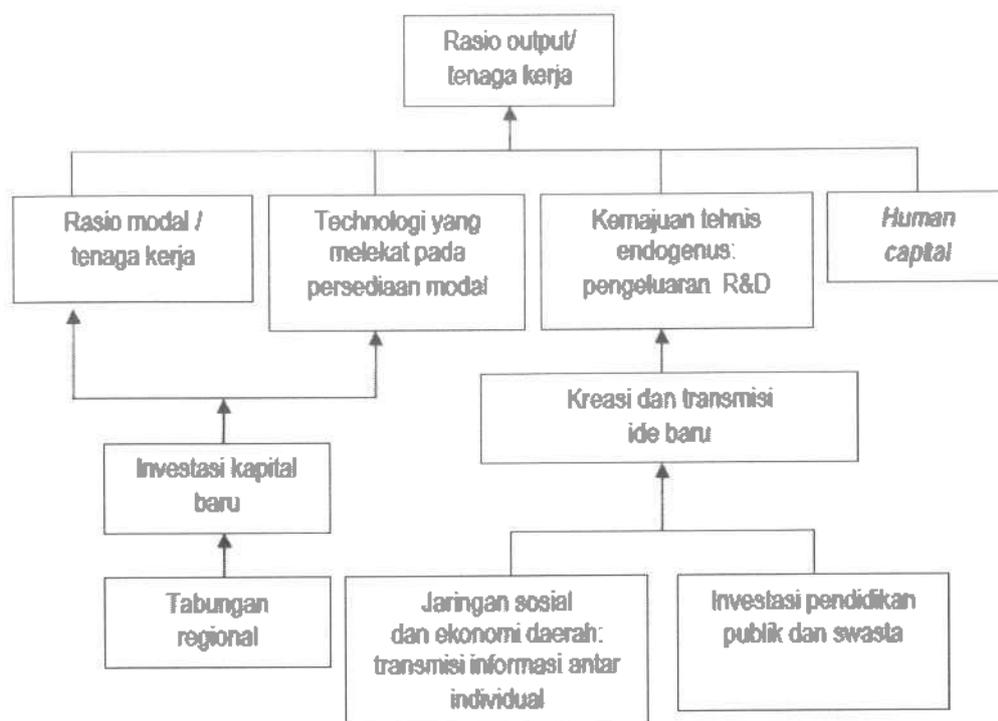
Pusat pertumbuhan jika dilihat secara fungsional adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan

ekonomi, baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik bagi berbagai macam usaha untuk berlokasi di daerah tersebut dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Tidak semua kota generative dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat cirri yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier effect (efek ganda), konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakang. (Robinson,2004: 115).

Faktor Penentu Produktifitas

Faktor penentu peningkatan produktivitas (output per tenaga kerja) menurut Armstrong dan Taylor (2000) adalah sebagai berikut: Rasio output/tenaga kerja, Rasio modal/tenaga kerja, dan Teknologi yang melekat pada persediaan modal. Kemajuan tehnik endogenus: pengeluaran R&D, Human capital, Kreasi dan transmisi ide baru, Investasi kapital baru, Tabungan regional, Jaringan sosial dan ekonomi daerah transmisi informasi antar individual, dan Investasi pendidikan publik dan swasta. Sumber : Armstrong & Taylor (2000)

Gambar 2.3.
Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan produktivitas



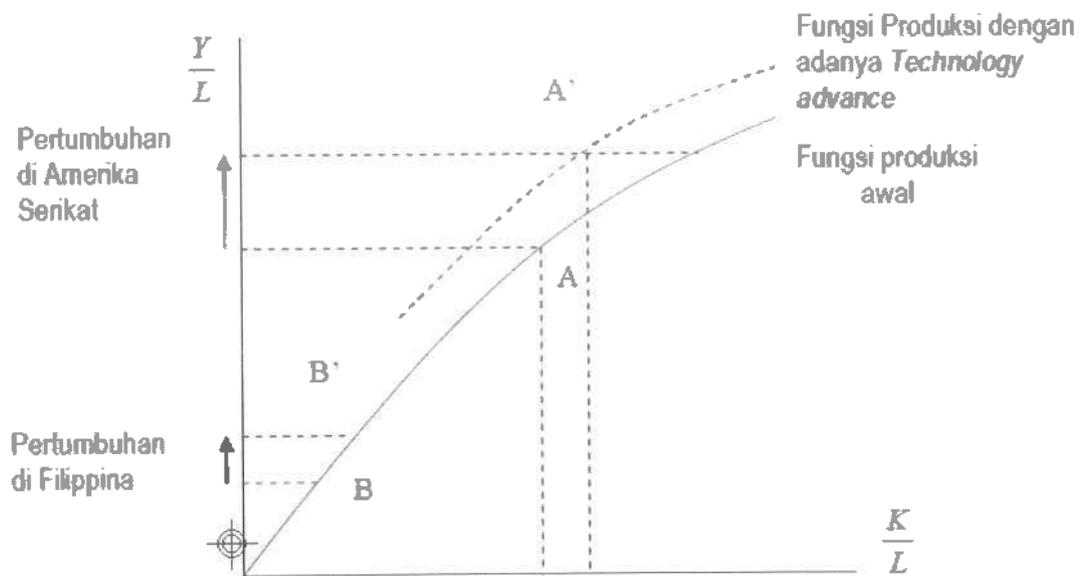
Sumber : Armstrong & Taylor (2000)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang yang diukur melalui indikator perkembangan PDRB riil dari tahun ke tahun. PDRB merupakan indikator pengukur nilai output akhir (final output) barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu daerah dengan mengurangi penghasilan penduduk daerah tersebut di luar negeri dari pendapatan daerah dan kemudian ditambahkan dengan penghasilan penduduk asing yang memproduksi di daerah tersebut pada tahun atau periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan

pembangunan ekonomi. Kenaikan kapasitas ini ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznets dalam Todaro & Smith, 2003).

Model pertumbuhan endogen (endogeneous growth) menurut Romer memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita dalam perekonomian adalah : $g - n = \beta / [1 - a + \beta]$, dimana: g adalah tingkat pertumbuhan output, n adalah tingkat pertumbuhan populasi, β adalah perubahan teknologi, dan a adalah elastisitas output terhadap modal. Seperti dalam model Solow dengan skala hasil konstan $\beta = 0$, maka pertumbuhan pendapatan per kapita akan menjadi nol (tanpa adanya kemajuan teknologi). Namun Romer (1986), mengasumsikan bahwa dengan mengumpulkan ketiga faktor produksi termasuk eksternalitas modal, maka $\beta > 0$ sehingga $g - n > 0$ dan Y/L (pendapatan per kapita) akan mengalami pertumbuhan. Hal yang menarik dalam model Romer adalah adanya imbasan investasi atau teknologi yang semakin meningkat, sehingga menghilangkan asumsi hasil yang semakin menurun (diminishing marginal productivity of capital). Seperti digambarkan pada kurva berikut ini:

Gambar 2.4.
Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen



Sumber: Kasliwal (1995)

Faktor-faktor Non Ekonomi Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Kelemahan utama teori-teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan para ekonom adalah mengabaikan faktor-faktor institusi, tata nilai maupun faktor-faktor non ekonomi lainnya. Padahal pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga faktor-faktor non ekonomi. Perbedaan faktor-faktor non ekonomi inilah yang menyebabkan mengapa kebijakan ekonomi yang sama akan memberikan hasil berbeda bila diterapkan di beberapa negara atau wilayah yang berbeda. Beberapa faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan adalah; faktor sosial-budaya, faktor politik dan administratif.

Faktor sosial budaya dapat menjadi penghambat atau pendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada kebijakan-kebijakan lokal yang dapat dijadikan modal untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi membutuhkan langkah-langkah penyesuaian di bidang sosial budaya, agar mampu menjadi pendorong dan pendukung kemajuan/perubahan. Kegagalan pengelolaan faktor sosial budaya merupakan salah satu penyebab munculnya konflik yang berkepanjangan.

Struktur politik yang berpengaruh terhadap stabilitas politik, juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Wilayah-wilayah yang struktur politiknya rapuh atau tidak seimbang, seperti dapat dilihat pada banyak negara di Afrika dan Amerika Selatan, akan berhadapan dengan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Selanjutnya ketidakstabilan politik ini akan menurunkan tingkat investasi, mengganggu stabilitas ekonomi misal; inflasi yang bergejolak. Kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM, juga mengganggu iklim perekonomian yang semula berjalan tenang menjadi gaduh, sehingga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Faktor administrasi juga amat menentukan stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi. Dalam banyak kasus, kegagalan pembangunan di negara-negara sedang berkembang (NSB) lebih banyak disebabkan oleh lemahnya daya dukung administrasi negara atau birokrasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Lemahnya daya dukung administrasi ini bisa disebabkan rendahnya kapasitas birokrasi dan atau terlalu muluknya target-target pembangunan yang ditetapkan oleh para elit politik/kekuasaan (Tjiptoherijanto, Manurung, tahun 2010).

Menurut Nurkse (dalam Jhingan, 1995 : 93) : “Pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis”. Didalam Pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik dan psikologis adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi. Kondisi sosial yang kacau karena konflik di suatu daerah pasti juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, Koentjaraningrat (1984) salah satu resiko dari keragaman masyarakat Indonesia adalah sulitnya mengintegrasikan potensi keragaman tersebut untuk tujuan pembangunan. Selanjutnya, Koentjaraningrat mengemukakan ada empat sub masalah yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Masalah mempersatukan aneka warna suku bangsa
2. Masalah hubungan antar umat beragama
3. Masalah hubungan mayoritas-minoritas
4. Masalah mengintegrasikan kebudayaan-kebudayaan di Irian Jaya dan Timor-Timur dengan kebudayaan Indonesia.

Apa yang diutarakan Koentjaraningrat, maupun para ahli ilmu sosial lainnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil membutuhkan fondasi integrasi tata nilai, perdamaian dan perlakuan adil terhadap para pelaku ekonomi, tanpa memandang garis keturunan, suku maupun agama. Dalam kenyataannya, mengelola perbedaan-perbedaan tersebut amatlah sulit dan karenanya harus dilakukan dengan sabar dan seksama. Kompleksitas faktor-faktor non ekonomi seperti yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa pengabaian faktor-faktor tersebut amat berisiko.

e. Gambaran Umum APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu alat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai alat pengelolaan perekonomian negara. Mengenai APBN telah diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII, Hal Keuangan, diantaranya adalah pasal 23 ayat (1) perubahan ketiga yang berbunyi: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Sejak Indonesia merdeka telah dilakukan upaya untuk mulai menyusun pengelolaan keuangan negara. Di mulai sejak tahun 1950-an dirumuskan APBN, namun saat itu fungsinya hanya sebagai perhitungan sementara untuk memberikan patokan sebagai dasar pembuatan APBN di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1960 APBN menganut sistem berimbang dan dinamis yang menggantikan APBN dengan sistem Moneter pada jaman Orde Lama. Bentuk APBN sistem moneter menyatukan Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa. APBN berimbang dan dinamis terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman), sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin, sedangkan penerimaan luar negeri digunakan untuk membiayai belanja pembangunan.

Menurut Frans Seda (2009; h.3) dasar hukum dalam penyusunan APBN adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara (*Indische Comptabiliteitswet*) yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Menurut UU/ICW ini, struktur APBN dari sisi penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri (perpajakan) dan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja modal. Dengan demikian, APBN berimbang ala ICW adalah pendapatan pajak dihasilkan dari belanja rutin ditambah belanja modal.

APBN berimbang dan dinamis mengubah seluruh struktur APBN eks ICW. Salah satunya adalah mengubah pelaksanaan dari ketentuan kas yang diatur dalam Undang-Undang ICW. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa semua pendapatan negara harus masuk kas negara pada hari yang sama. Pada akhir tahun anggaran, sisa anggaran di kas menjadi hangus.

Pasca pemerintahan orde baru dimulai dengan adanya krisis yang melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Selama masa krisis, APBN dalam periode 1998/1999-2000 menghadapi tekanan yang cukup berat akibat membengkaknya beban pengeluaran negara serta menyusutnya penerimaan negara. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1998/1999 juga tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Namun dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari berbagai perkembangan di dalam dan di luar negeri. Dalam hal ini kondisi perekonomian nasional yang sejak pertengahan tahun 1997 berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian nasional. Melalui ketetapan dalam APBN 2000, maka RAPBN 2001 masa dimulai pada tanggal 1

Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini telah pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan peraturan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2001 selain mengikuti standar internasional juga diselaraskan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut.

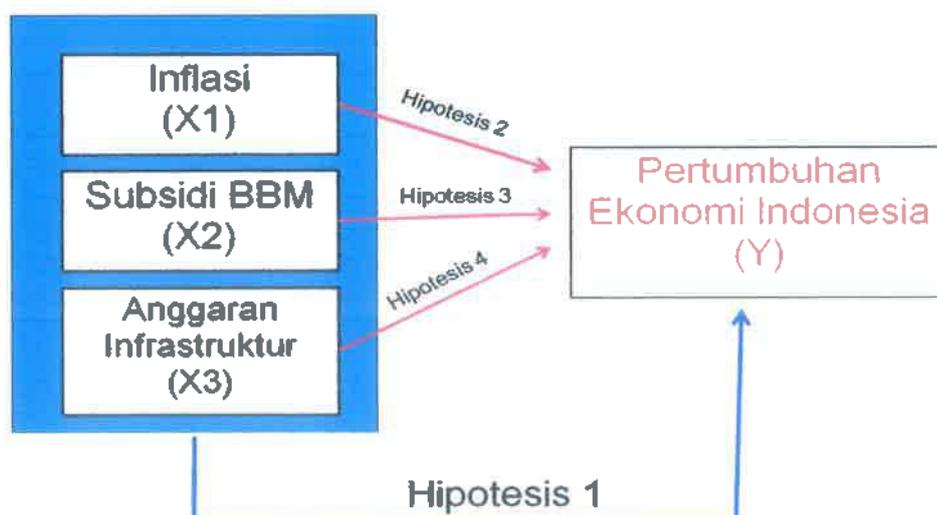
Mulai tahun 2005 pemerintah menerapkan format baru yang didalamnya belanja negara tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah seperti pada format lama. Khusus untuk belanja pemerintah pusat, perubahan-perubahan pada format baru ini adalah melaksanakan sistem penganggaran terpadu (*unified budget*) dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan serta mereklasifikasi rincian belanja. Sementara itu belanja untuk daerah tidak mengalami perubahan format.

2.2. Penelitian terdahulu

Peneliti	Hasil
Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti (2008)	variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRBP meskipun tidak signifikan
Miller dan Russek (1993), Levin dan Renelt (1992)	inflasi memberikan dampak negatif secara konsisten.
Djoko Suseno (2007)	Kenaikan harga BBM melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi
Sibarani (2002)	infrastruktur (jalan, listrik, telepon) memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada agregat output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita.

Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus (2009)	infrastruktur baik listrik, jalan maupun air bersih mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian di Indonesia
Yanuar (2006)	infrastruktur secara parsial memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output baik pada sektor pertanian maupun non-pertanian
Jamzy Zodik (2006)	pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional
Singh dan Sahni (1984) dan Ram (1986)	Ekspansi pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
Folster dan Henrekson (1999) dalam Nijkamp and Poot: 2003	adanya dampak negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
Cheng (1997)	Adanya pengaruh positif signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4. Hipotesis

Sesuai dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas dapat di buat rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan pada inflasi, subsidi BBM dan anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial pada inflasi, terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial pada subsidi BBM terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial pada anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Konseptual & Operasional Variabel

Penulis mengelompokkan dua variabel data berdasarkan kepada perumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis yang telah diuraikan pada Bab II. Kedua variabel terdiri dari variabel tetap dan variabel bebas. Variabel terikat (*Dependen Variable*) yang diambil adalah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sedangkan Variabel bebas (*Independen Variable*) adalah variabel-variabel yang pada hipotesis diduga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu Inflasi, subsidi BBM, dan Anggaran Infrastruktur. Definisi dari keempat variabel ini ditunjukkan pada Tabel 3.1 seperti yang terlihat dibawah ini :

Tabel 3.1.
Definisi Variabel Bebas dan Variabel Terikat Penelitian

Variabel	Indikator	Satuan	Jenis variabel
Inflasi	Inflasi menurut BPS dari tahun 2005-2012	%	Bebas
Subsidi BBM	Subsidi BBM menurut Nota Keuangan & LKPP tahun 2005-2012	%	Bebas
Anggaran Infrastruktur	Anggaran Infrastruktur menurut Ditjen Anggaran, Kemenkeu tahun 2005-2012	%	Bebas
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi menurut BPS 2005-2012	%	Terikat

3.2. Model Penelitian

Penelitian dibangun dengan menggunakan pendekatan ekonometrika dalam bentuk model sistem persamaan simultan (simultaneous equation model) yang terdiri dari:

- X1 : Inflasi
- X2 : Subsidi BBM
- X3 : Anggaran Infrastruktur
- Y : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Metode pendugaan model menggunakan Two Stage Least Squares (2SLS), karena setiap persamaan struktural bersifat over identified (Koutsoyiannis, 1977). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16. Penelitian akan menggunakan data sekunder berupa data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah; (BPS), laporan keuangan pemerintah, Nota Keuangan dan APBN tahun 2005-2012.

3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dari hasil laporan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, UU tentang APBN (2005-2012) dan Badan Pusat Statistik selama periode 2005-2012.

3.4. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis untuk mengetahui gambaran dan keterkaitan variabel terikat dengan variabel bebas. Penelitian deskriptif

bertujuan untuk mengetahui gambaran variabel. Analisis deskriptif digunakan bila peneliti hanya ingin membuat kesimpulan yang berlaku pada sampel.

2. Analisis inferensial

Analisis inferensial adalah analisis untuk mengetahui gambaran dan keterkaitan variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis dilakukan jika peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku pada populasi.

Dalam hal analisis inferensial dikenal beberapa analisis yaitu:

a. Regresi berganda,

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel bebas (*kriterium*), terhadap satu atau lebih dari satu variabel bebas sebagai faktor prediktor yang dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

b. Koefisien determinasi (r^2)

Koefisien determinasi adalah koefisien yang menunjukkan berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap 1 (satu) buah variabel terikat dalam persamaan regresi.

c. Koefisien determinasi yang disesuaikan (*ajusted- r^2*)

Koefisien determinasi yang disesuaikan (*ajusted r^2*) adalah koefisien yang menunjukkan berapa persen pengaruh variabel bebas (lebih dari satu variabel) terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi ganda.

3. Persyaratan data variabel

a. Normal

Pengujian normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan kepada model penelitian. Salah satu persyaratan penggunaan statistik parametrik adalah data harus terdistribusi normal. Pengujian normalitas data ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normal tidaknya suatu data variabel, salah satunya dapat menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Aturan untuk menetapkan kenormalan suatu data adalah data dikatakan terdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada output SPSS lebih besar dari *level of signifikan (0.05)*, bila sebaliknya maka data dikatakan tidak terdistribusi normal. Analisis untuk pengujian normalitas menggunakan bantuan komputer software SPSS versi 16.

b. Multikolinearitas

Multikolinieritas terjadi jika antara variabel bebas mempunyai hubungan langsung (berkolerasi) sempurna, biasanya multikolinearitas terjadi pada kata berkala (*time series data*) dan antar sample (*cross sectional*). Kombinasi dari keduanya dikenal

dengan penghubung data (*pooling the data*) konsekuensi dari multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi yang nilainya kecil, dan *standar error regression* nilainya besar.

Santoso (2001) menjelaskan cara untuk mendeteksi multikolinearitas yaitu:

- 1) Melihat nilai dari *variance inflation factor* (VIF). Jika VIF lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya,
- 2) Menggunakan nilai eugenvalue mendekati nol,
- 3) Menentukan nilai *condition index*, multikolinearitas akan terjadi jika index melebihi 15, dan benar-benar masalah serius jika indeks melebihi 30.

Untuk mengetahui multikolinearitas dari suatu model dapat diuji dengan menggunakan koefisien korelasi person dengan menggunakan uji *Variance Inflation Facktor* (VIF).

Ho ; $VIF < 10$, artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas

Ha ; $VIF > 10$ terdapat gejala multikolinearitas.

c. **Heteroskedastisitas**

Menunjukkan bahwa varians dari setiap error bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varian error harus bersifat homogen. Menurut Lordaro (1993)

dalam Azwar (2000;182) heterokedastisitas merupakan asumsi penting dari analisis regresi linier berganda, yaitu gangguan (*error terms*), error terms yang muncul dalam fungsi regresi populasi homoskedastik, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Sedangkan jika varian tidak sama akan terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi akibat perubahan situasi yang tidak digambarkan dalam spesifikasi model regresi.

4. Analisis Regresi

a. Regresi linier ganda (*multiple linier regression*)

Variabel yang di analisis lebih dari 1 (satu) variabel sehingga model persamaannya adalah regresi linier berganda (*multiple linier regression*). Pemodelan regresi linier berganda yang menganalisis variabel independen terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

$$P.\text{Ekonomi} = a + b_1 \text{Inflasi} + b_2 \text{Subsidi BBM} + b_3 \text{Infrastruktur} + e$$

Keterangan :

- a = konstanta
- b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi
- e = galat (eror/kesalahan)

3.5. Pengujian Hipotesis Penelitian.

Untuk menguji apakah secara statistik peubah bebas yang dipilih berpengaruh nyata terhadap peubah terikat dapat dilakukan uji statistik F dan uji statistik t.

1. Uji-F

Nilai F-hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$(Aris Ananta, 1987 : 37) \quad F_{hit} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (N - k - 1)}$$

Dengan :

N : jumlah sampel

K : jumlah variabel termasuk intersip

R^2 : koefisien determinasi.

Uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel bebas terhadap variabel terikat, secara bersama-sama (simultan) akan dilakukan dengan uji - F (*F-test*).

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$$

Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama (serentak) dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat

$$H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$$

Artinya: terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (serentak) dari variabel bebas terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi.

Kriteria Uji :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $F_{hitung} < -F_{tabel}$

H_0 ditolak, H_1 diterima

Pernyataan diatas memberi arti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (serentak) dari variabel bebas terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $F_{hitung} > -F_{tabel}$

H_0 diterima, H_1 ditolak

Pernyataan diatas memberi arti bahwa dari variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi.

2. Uji-t

Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap PER ditentukan dengan uji statistik t dua sisi (*two-tailed t-test*). Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan rumus : (Damodar Gujarati, 1995 : 114)

$$t_{hitung} = \frac{\text{Koefisien Re gresi}(b_i)}{\text{STANDAR Deviasi}(SD_i)}$$

Uji statistik t menentukan daerah kritis dari variabel bebas Inflasi, Subsidi BBM, dan Anggaran Infrastruktur secara parsial yang mempengaruhi variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi, lalu dibandingkan dengan t_{tabel} untuk mengetahui signifikansi variabel bebas tersebut. Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : b_i = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi.

$H_1 : b_i \neq 0$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi.

Untuk menguji signifikansi regresi variabel bebas dengan variabel terikat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

H_0 ditolak dan H_1 diterima, menandakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat,

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$

H_0 , diterima dan H_1 ditolak, menandakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambunga. Untuk mencapai kondisi tersebut, di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai factor eksternal dan factor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi ke depan. Koordinasi kebijakan antara kebijakan ekonomi moneter, kebijakan fiskal, dan sektor riil semakin ditingkatkan, baik di level pusat maupun daerah.

Pembangunan ekonomi nasional juga terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan membaiknya investasi sehingga diharapkan dapat memenuhi peningkatan kebutuhan nasional dan memperkecil *output gap*. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi serta pemerataan pembangunan nasional, pemerintah berencana untk menerapkan strategi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Pecepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam rangka menopang kelancaran arus distribusi kebutuhan masyarakat, baik dalam amaupun antar pulau di Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan bagian integral dari pembangunan di Indonesia. Infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu

kawasan. Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya.

Dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran, membaiknya infrastruktur dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta nilai tukar rupiah yang stabil, diharapkan dapat menjaga agar laju inflasi berada pada level yang rendah dan stabil, konvergen dengan laju inflasi di negara-negara kawasan.

Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak jenis tertentu (bahan bakar minyak dan bahan bakar nabati), *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 kilogram, dan *liquefied gasfor Vehicle* (LGV) serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Realisasi anggaran belanja subsidi energi dalam rentang waktu 2007-2012 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp. 85,5 triliun atau tumbuh rata-rata 11,6 persen per tahun, yaitu dari Rp. 116,9 triliun (3,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp. 202,4 triliun (2,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2012. Peningkatan realisasi anggaran subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan : (1). Perubahan parameter subsidi energi, diantaranya ICP, nilai tukar rupiah terhadap USD, volume konsumsi BBM bersubsidi, bauran energi dalam produksi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; serta (2). Kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi dan tarif tenaga listrik.

Selanjutnya subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual BBM bersubsidi sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan harga pasar (keekonomian) BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai factor eksternal, antara lain harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap USD. Pada saat ini, subsidi BBM hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/*kerosene*, minyak solar/*gas oil*, dan bensin/*premium*). Selain itu pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV dalam rangka mendorong pemanfaatan energi non BBM.

4.2. Pembiayaan Anggaran

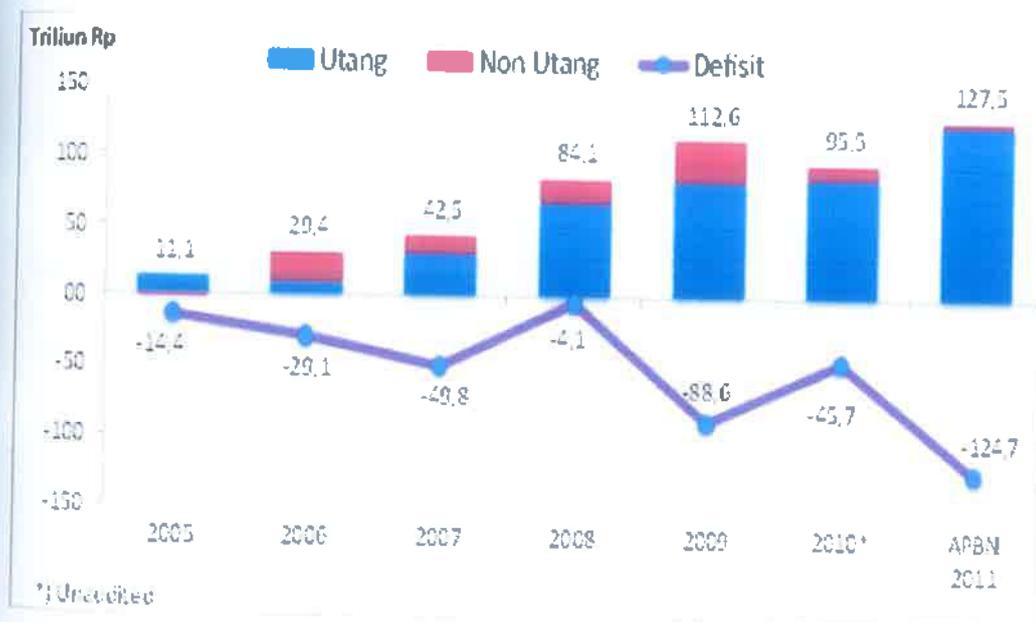
Pada tahun 2010, realisasi defisit sebesar Rp. 45,8 triliun atau 0,7 persen PDB. Realisasi tersebut lebih rendah dari target APBN-P 2010 sebesar Rp. 133,7 triliun atau 2,1 persen PDB dan juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar 1,6 persen PDB. Sementara itu, dalam upaya menutup defisit pada tahun 2010, pembiayaan anggaran direalisasikan sebesar Rp. 90,5 triliun. Sumber utama pembiayaan berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp. 86,6 triliun, terutama berasal dari SBN. Sementara itu, pembiayaan non utang sebesar Rp.8,9 triliun terutama berasal dari dana rekening pemerintah.

Jika dibandingkan dengan target pembiayaan pada APBN-P tahun 2010 sebesar Rp133,7 triliun, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2010 lebih rendah.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp. 29,5 triliun, realisasi tahun 2010 juga lebih rendah. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya pengurangan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pengurangan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), lebih rendahnya penarikan pinjaman proyek, serta lebih rendahnya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebagai dampak dari apresiasi kurs rupiah. Perkembangan defisit dan pembiayaan dalam periode 2005-2011 dapat dilihat dalam Grafik 4.3 berikut:

Grafik 4.1

Perkembangan Pembiayaan APBN Tahun 2005-2011



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2011, pemerintah kembali melakukan ekspansi fiskal dan merencanakan tingkat defisit sebesar 1,8 persen PDB pada APBN. Namun, di sisi pembiayaan tahun 2011 juga dilakukan peningkatan dana investasi pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir pengadaan tanah untuk jalan tol (BPJT),

dana pengembangan pendidikan nasional, serta pinjaman kepada PT. PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Untuk menutup rencana defisit pada tahun 2011 tersebut, pemerintah mengambil kebijakan pembiayaan antara lain: (i) berorientasi pada sumber pembiayaan yang berisiko rendah; (ii) memprioritaskan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri, terutama berasal dari penerbitan Surat.

4.3. Deskripsi Variabel

Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda – beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan/penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan negara itu tinggi maka pertumbuhannya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata – rata maka pertumbuhannya juga rendah. Dilihat dari sumbernya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut terutama didukung oleh konsumsi swasta dan ekspor.

Kondisi perekonomian yang cukup baik diikuti oleh membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah jumlah penduduk yang hidup di garis kemiskinan yang menurun dan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Selain itu, salah satu ukuran tingkat produktivitas adalah pendapatan per kapita.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 tercatat 4,5 persen, turun dibanding 2008 yang mencapai 6,1 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2009 ini diakibatkan oleh turunnya ekspor. Pada periode tersebut pertumbuhan

tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 15,5 persen. Sedangkan dari sisi penggunaan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada konsumsi pemerintah, meskipun sektor tersebut bukan yang memberikan kontribusi tertinggi.

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada tahun 2009 mencapai US\$ 116,51 miliar atau turun 14,98 persen dibanding periode yang sama tahun 2008. Negara utama tujuan ekspor terbesar adalah Jepang diikuti Amerika Serikat dan Cina. Sementara, pada periode yang sama nilai impor Indonesia mencapai US\$ 96,83 miliar yang berarti mengalami penurunan sebesar 25,05 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama tahun 2009 masih ditempati oleh Cina, Jepang dan Singapura.

Sementara dampak krisis global terhadap inflasi tidak terlihat signifikan. Inflasi pada tahun 2009 mencapai 2,78 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 113,86 pada bulan Desember 2008 menjadi 117,03 pada bulan Desember 2009. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memberi andil terbesar, yaitu sebesar 1,27 persen. Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi inflasi adalah gula pasir, emas perhiasan dan beras yang masing-masing memberikan andil terhadap inflasi lebih dari 0,20 persen.

Di sektor rill, produksi padi pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 6,64 persen yang utamanya disebabkan oleh kenaikan jumlah produksi padi sawah sebesar 3,94 juta ton. Kenaikan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen seluas 550,61 ribu hektar (4,47 persen) dan juga produktivitas sebesar 1,01

kuintal/hektar (2,06 persen). Jika dilihat menurut wilayah, kenaikan produksi padi tahun 2009 tersebut terjadi di Pulau Jawa sebesar 7,69 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 5,42 persen.

Jumlah wisatawan asing/mancanegara (Wisman) menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Pada tahun 2009, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 6.323,7 orang yang berarti meningkat 1,43 persen dibanding jumlah wisman pada tahun sebelumnya. Namun demikian, rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia mengalami penurunan sebesar 10,37 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 8,58 hari menjadi 7,69 hari.

Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari 34,96 juta pada tahun 2008 menjadi 32,53 juta pada tahun 2009. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, yaitu dari 8,39 persen pada tahun 2008 menjadi sebesar 7,87 persen pada tahun 2009. Pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan selama periode 2008-2009 sebesar 11,98 persen.

Di tengah kondisi pelemahan ekonomi di berbagai kawasan, perekonomian Indonesia di tahun 2011 tetap mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Laju inflasi yang terus menurun dengan angka rata-rata 3,79 persen yang jauh lebih rendah dari target APBN-P 2011 sebesar 5,65 persen. Selama 2011, nilai tukar rupiah bergerak dengan fluktuasi yang relative lebih kecil bila dibandingkan pergerakannya di tahun 2010. Rata-rata nilai tukar di tahun 2011 Rp. 8.779 per USD, lebih rendah dibanding tahun 2010 yang rata-ratanya Rp. 9.087 per USD.

Di wilayah Asia Tenggara, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di tahun 2011. Pertumbuhan Ekonomi menurun dari 6,9 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 4,8 persen (yoy) tahun 2011. Empat Negara ASEAN-5 mengalami pertumbuhan di tahun 2011 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Indonesia satu-satunya Negara ASEAN-5 yang masih mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu dari 6,2 persen (yoy) tahun 2010 menjadi 6,5 persen (yoy) di tahun 2011. Berikut ini tabel data pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN-5 *

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5
Tahun 2010-2011

No.	Negara	Pertumbuhan (%)	
		2010	2011
1	Indonesia	6,2	6,5
2	Thailand	7,8	0,1
3	Filipina	7,6	3,7
4	Singapura	14,8	4,9
5	Malaysia	7,2	5,1

*Sumber: Bloomberg

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 diperkirakan masih tetap stabil dan mampu bertahan dari gejolak ekonomi yang melanda Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

4.4. Hasil Statistik

Setelah dilakukan pengumpulan data sekunder, maka seluruh data ditabulasi ke dalam program statistik SPSS versi 16. Analisa koefisien korelasi parsial dihitung berdasarkan korelasi yang dipergunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel. Berikut ini adalah perhitungan data yang dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), APBN dan BPS, didapat data yang dipakai sebagai input data statistic sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Data Input Statistik

**Pengaruh Variabel Independen: Inflasi, Subsidi BBM, dan Anggaran
Infrastruktur, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

No.	TAHUN	KUARTAL	INFLASI (y o y) (%)	REALISASI SUBSIDI BBM (% dari PDB)	REALISASI ANGG.INFRASTRUKTUR (% dari PDB)	PERTUMB. EKONOMI (y o y), (%)
1	2005	I	8.81	0.85	0.24	6.35
2		II	7.42	0.85	0.24	5.54
3		III	9.06	0.85	0.24	5.34
4		IV	17.11	0.85	0.24	3.16
5	2006	I	15.74	0.48	0.41	4.59
6		II	15.53	0.48	0.41	5.22
7		III	14.55	0.48	0.41	5.52
8		IV	6.60	0.48	0.41	6.10
9	2007	I	6.52	0.53	0.38	6.00
10		II	5.77	0.53	0.38	6.30
11		III	6.95	0.53	0.38	6.50
12		IV	6.59	0.53	0.38	6.30
13	2008	I	8.17	0.75	0.40	6.40
14		II	11.03	0.75	0.40	6.40
15		III	12.14	0.75	0.40	6.10
16		IV	11.06	0.75	0.40	5.20
17	2009	I	7.92	0.20	0.41	4.40
18		II	3.65	0.20	0.41	4.00
19		III	2.83	0.20	0.41	4.20
20		IV	2.78	0.20	0.41	5.40
21	2010	I	3.43	0.33	0.39	5.70
22		II	5.05	0.33	0.39	6.20
23		III	5.80	0.33	0.39	5.80
24		IV	6.96	0.33	0.39	6.90
25	2011	I	6.65	0.55	0.42	6.50
26		II	5.54	0.55	0.42	6.50
27		III	4.61	0.55	0.42	6.50
28		IV	3.79	0.55	0.42	6.50
29	2012	I	3.97	0.40	0.49	6.30
30		II	4.53	0.40	0.49	6.40
31		III	4.31	0.40	0.49	6.17
32		IV	4.30	0.40	0.49	6.30

Sumber:

BPS

Nota
Keuangan,
LKPPDitjen Anggaran,
Kemenkeu

BPS

Untuk membuktikan hipotesis pertama, yaitu untuk menguji signifikansi pengaruh variabel faktor-faktor Independen: Inflasi, Subsidi BBM, Anggaran Infrastruktur, secara bersama-sama terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi, digunakan analisis regresi linier berganda melalui uji F. Hasil analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16, dibuat berdasarkan data pada tabel tabel 4.2, maka analisis statistik dilakukan dengan metode regresi berganda. Hasil perhitungan regresi berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Tabel Korelasi Antar Variabel

		Correlations			
		Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Subsidi BBM	Anggaran Infrastruktur
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	1	-.378*	.110	.306
	Sig. (2-tailed)		.033	.548	.089
	N	32	32	32	32
Inflasi	Pearson Correlation	-.378*	1	.526**	-.376*
	Sig. (2-tailed)	.033		.002	.034
	N	32	32	32	32
Subsidi BBM	Pearson Correlation	.110	.526**	1	-.627**
	Sig. (2-tailed)	.548	.002		.000
	N	32	32	32	32
Anggaran Infrastruktur	Pearson Correlation	.306	-.376*	-.627**	1
	Sig. (2-tailed)	.089	.034	.000	
	N	32	32	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel korelasi didapatkan hasil mengenai hubungan antara variabel yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi terhadap Inflasi korelasi $-0,378$ dengan taraf signifikan $0,033$ berarti signifikan negative yang artinya jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi turun secara signifikan.
- Pertumbuhan Ekonomi terhadap Subsidi BBM korelasi $0,110$ dengan taraf signifikan $0,548$ berarti tidak signifikan. Korelasi positif menunjukkan jika variable Subsidi BBM naik maka Pertumbuhan Ekonomi naik tapi tidak signifikan.
- Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Infrastruktur korelasi $0,306$ dengan taraf signifikan $0,089$. Korelasi positif menunjukkan jika variabel Anggaran Infrastruktur naik, maka Pertumbuhan Ekonomi juga naik (tidak signifikan).
- Inflasi terhadap Anggaran Infrastruktur berkorelasi $-0,376$ dengan taraf signifikan $0,034$ yang berarti signifikan. Jika Anggaran Infrastruktur naik, maka inflasi akan turun signifikan.
- Subsidi BBM terhadap Anggaran Infrastruktur korelasi $-0,627$ dengan taraf signifikan $0,000$ berarti sangat signifikan. Jika anggaran infrastruktur naik, maka subsidi BBM turun sangat signifikan.

Selanjutnya adalah perhitungan regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah dilakukan dengan empat variable independen, ternyata hanya tiga variable yang bisa dilanjutkan dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Analisis Korelasi Faktor-Faktor Independen:
Inflasi, Subsidi BBM, Pembiayaan Infrastruktur

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 ^a	.475	.418	.67038	1.041

a. Predictors: (Constant), Anggaran Infrastruktur, Inflasi, Subsidi BBM

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil analisis diketahui bahwa besarnya angka koefisien korelasi (R) adalah = 0,689, positif (mendekati 1) sehingga menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara variabel faktor-faktor Independen secara bersama-sama dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,475, berarti bahwa variabel-variabel bebas (Inflasi, Subsidi BBM, Anggaran Infrastruktur) secara bersama-sama mampu memberikan kontribusi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 47,5% sedangkan lainnya dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian ini. Nilai DW = 1,041 maka tidak terjadi autokorelasi karena DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$.

Tabel 4.5.
Hasil Analisis Pengaruh Bersama Faktor-Faktor Independen:
Inflasi, Subsidi BBM, Pembiayaan Infrastruktur

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.373	3	3.791	8.435	.000 ^a
	Residual	12.584	28	.449		
	Total	23.957	31			

a. Predictors: (Constant), Anggaran Infrastruktur, Inflasi, Subsidi BBM

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, besarnya F hitung = 8,435, dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut $< 0,05$, yang berarti bahwa faktor-faktor yang berupa: Inflasi, Subsidi BBM dan Anggaran Infrastruktur, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variabel Independen: Inflasi, Subsidi BBM, Anggaran Infrastruktur, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi terbukti.

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis kedua yaitu pengujian terhadap signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi dan besarnya kontribusi masing-masing. Pengujiannya dilakukan melalui uji-t masing-masing, yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda. Hasil analisis parsial tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Hasil Analisis Pengaruh Masing-Masing Faktor-Faktor Independen:
Inflasi, Subsidi BBM, Anggaran Infrastruktur

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.024	1.213		1.669	.106
Inflasi	-.126	.036	-.566	-3.505	.002
Subsidi BBM	3.343	.835	.769	4.003	.000
Anggaran Infrastruktur	7.596	2.328	.575	3.263	.003

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data yang diolah

Dengan menggunakan metode stepwise regression maka semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Berdasarkan tabel di atas, variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan subsidi BBM dan anggaran infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

Pertumbuhan Ekonomi	= 2,024 – 0,126 Inflasi + 3,343 Subsidi BBM	+ 7,596 Anggaran Infrastruktur
t	(-3,505)	(4,003)
sig	(0,002)	(0,000)

Persamaan di atas dapat diartikan bahwa:

- Pertumbuhan ekonomi awal adalah 2,024
- Setiap kenaikan inflasi 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,126 secara signifikan.
- Setiap kenaikan subsidi BBM 1% dari PDB akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,343% secara signifikan..
- Setiap kenaikan anggaran infrastruktur 1% dari PDB akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7,596% secara signifikan.
- Pengaruh subsidi BBM adalah paling dominan dengan nilai t terbesar, diikuti dengan inflasi dan terakhir anggaran infrastruktur.

Dari persamaan di atas terbukti bahwa inflasi mempunyai pengaruh (negatif) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti (2008) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB meskipun tidak signifikan. Penelitian lain yang sejalan adalah yang dilakukan oleh Miller dan Russek (1993), serta Levin dan Renelt (1992), hasil penelitian mereka menyatakan bahwa inflasi memberikan dampak negatif secara konsisten.

Subsidi BBM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belum banyak penelitian mengenai pengaruh subsidi BBM terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini barangkali disebabkan karena tidak banyak negara yang menerapkan subsidi BBM, misal India, China bahkan di Vietnam pun tidak ada subsidi BBM. Namun demikian Djoko Suseno (2007) telah meneliti mengenai dampak kenaikan harga BBM yang hasilnya adalah kenaikan harga BBM melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga BBM diasumsikan sebagai pengurangan subsidi BBM (penulis).

Variabel bebas lainnya yakni anggaran infrastruktur, berdasarkan persamaan regresi di atas memperlihatkan memiliki pengaruh (positif) terhadap pertumbuhan ekonomi. Telah banyak penelitian mengenai pengaruh anggaran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hampir semuanya memiliki hasil yang sama yaitu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa hasil penelitian yang sejalan antara lain; Penelitian Sibarani (2002) mengenai kontribusi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,

menyimpulkan bahwa infrastruktur (jalan, listrik, telepon) memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada agregat output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita, peneliti Rindang Bangun Prasetyo dan Muhammad Firdaus (2009),jurnal yang berjudul Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia, dan hasilnya infrastruktur baik listrik, jalan maupun air bersih mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian di Indonesia, demikian pula hasil penelitian Yanuar (2006) memperlihatkan bahwa infrastruktur secara parsial memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output baik pada sektor pertanian maupun non-pertanian.

Mengingat persamaan regresi linear memberikan hasil signifikan, maka model kemudian diuji menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu:

Kriteria Pengujian:

- Angka signifikansi (SIG) > 0,05, maka data berdistribusi normal.
- Angka signifikansi (SIG) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.7.
Hasil Uji Normalitas

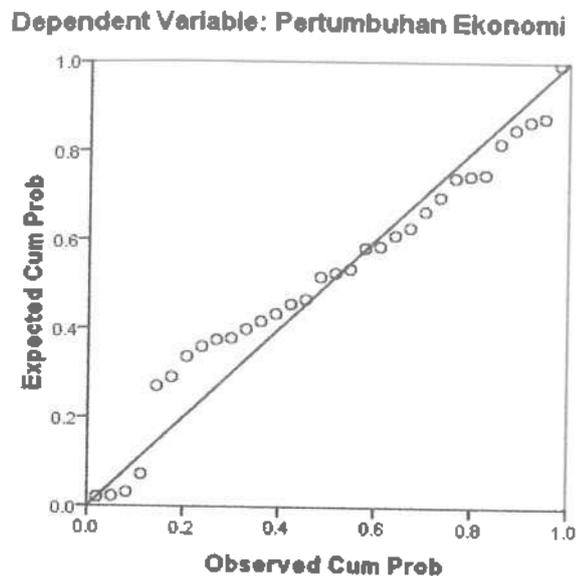
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Inflasi	Subsidi BBM	Anggaran Infrastruktur	Pertumbuhan Ekonomi
N		32	32	32	32
Normal	Mean	7.4741	.5113	.3925	5.7747
Parameters ^a	Std. Deviation	3.95453	.20215	.06658	.87909
Most Extreme	Absolute	.177	.174	.301	.207
Differences	Positive	.177	.174	.215	.173
	Negative	-.118	-.131	-.301	-.207
Kolmogorov-Smirnov Z		1.000	.984	1.700	1.170
Asymp. Sig. (2-tailed)		.270	.287	.006	.129
a. Test distribution is Normal.					

Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai Asymp. Signifikan (2 tailed) K-S pada variabel inflasi sebesar 0,270 sehingga variabel ini memiliki distribusi yang normal, nilai Asymp. Signifikan (2 tailed) K-S pada variabel Subsidi BBM yaitu sebesar 0,287 sehingga variabel ini memiliki distribusi yang normal, nilai Asymp. Signifikan (2 tailed) K-S pada variabel Anggaran Infrastruktur yaitu sebesar 0,006 sehingga variabel ini tidak memiliki distribusi yang normal. Nilai Asymp. Signifikan (2 tailed) K-S pada variabel Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 0,129 sehingga variabel ini memiliki distribusi yang normal.

Grafik 4.2
Grafik Normal Probability Plots

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari grafik normal probability plots di atas, menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal karena titik-titik (dots) mengikuti garis diagonal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk menguji multikolinearitas, dilakukan pengujian dengan ketentuan, yaitu : (a) Apabila memiliki nilai VIF (variance inflation factor) disekitar angka 1; (b) Mempunyai angka Tolerance mendekati 1, dan (c) Apabila kedua kriteria tersebut dipenuhi, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.024	1.213	1.669	.106		
Inflasi	-.126	.036	-3.505	.002	.720	1.389
Subsidi BBM	3.343	.835	4.003	.000	.509	1.966
Anggaran Infrastruktur	7.596	2.328	3.263	.003	.604	1.657

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Hasil analisis pada tabel di atas, diketahui bahwa variable inflasi besarnya nilai VIF = 1,389 dengan nilai Tolerance sebesar 0,720. Variabel Subsidi BBM dengan nilai VIF sebesar = 1,966 dengan nilai Tolerance = 0,509. Variabel Anggaran Infrastruktur dengan nilai VIF = 1,657 dan nilai Tolerance = 0,604.

Dengan demikian, berdasarkan data hasil analisis pada tabel dan ketentuan pengujian multikolinearitas tersebut, diketahui bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai VIF di sekitar angka 1, dan nilai Tolerance kurang dari angka 1. Hal ini berarti, ketiga variabel bebas tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

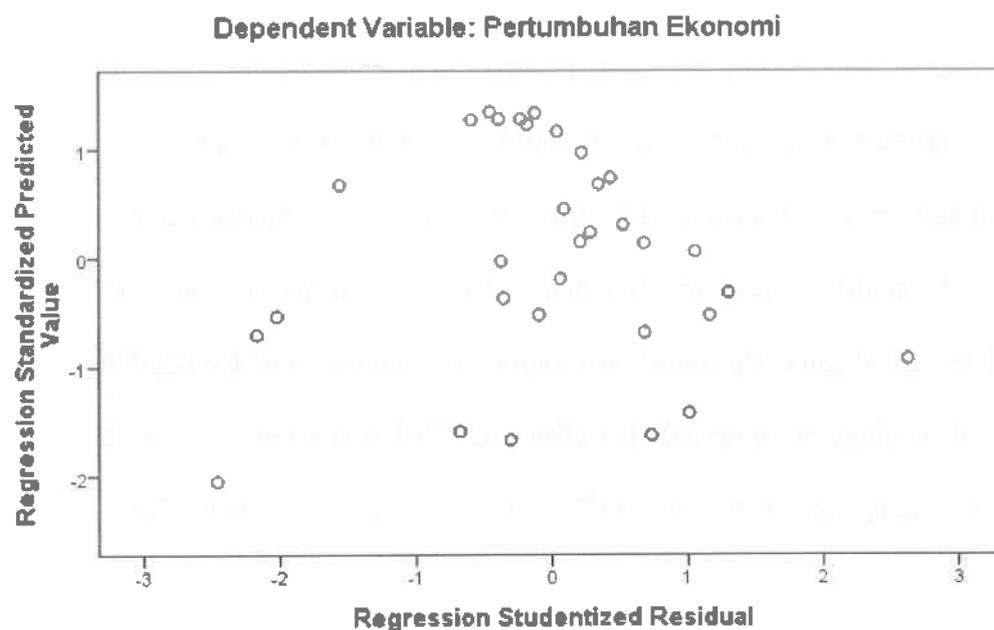
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini hasilnya yaitu titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas di bawah angka 0

pada sumbu Y. Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplots di bawah ini.

Grafik 4.3
Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas

Charts

Scatterplot



Dari analisis hasil output SPSS (gambar scatterplot) di atas, didapatkan titik-titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi berdasarkan masukan ketiga variabel independen (inflasi, subsidi BBM, anggaran Infrastruktur) tersebut.

4.5. Implikasi Managerial

Inflasi yang tinggi memiliki dampak terhadap menurunnya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, serta ekspektasi penghasilan konsumen, dan pertumbuhan uang untuk transaksi (*transaction for money*). Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 1992 laju inflasi nasional yang terjadi adalah sebesar 4,94 persen. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 365,37 persen. Pada tahun 1993 laju inflasi meningkat menjadi sebesar 9,77 persen dengan IHK yang meningkat menjadi sebesar 379,12 persen. Dan pada tahun berikutnya laju inflasi dan IHK mengalami fluktuasi yang diakibatkan karena kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil. Pada masa resesi tahun 1998 laju inflasi di Indonesia meningkat drastis menjadi sebesar 77,55 persen dengan IHK yang meningkat juga sebesar 540,38 persen yang diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi moneter atau yang lebih dikenal krismon yang melanda Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya yang menyebabkan anjloknya mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yaitu USD. Dengan terjadinya krisis moneter menyebabkan harga-harga barang meningkat drastis sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan berimbas kepada para pengusaha karena barang produksinya tidak habis di pasar sehingga para pengusaha harus mengurangi hasil produksi dan banyak para tenaga kerja yang harus diberhentikan dan ada juga perusahaan yang mengalami

gulung tikar. Untuk mencegah inflasi yang sangat drastis maka pemerintah mulai melakukan pengontrolan dan pengetatan terhadap harga-harga barang dan jasa yang ada di pasar.

Pada tahun 2007 laju inflasi bergerak relatif stabil pada level 6.6 persen (yoy). Sementara itu tahun 2008, lonjakan harga energi dan bahan pangan di pasar internasional telah mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan penyesuaian harga BBM pada Juni 2008. Tekanan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional dan domestik tersebut menyebabkan peningkatan laju inflasi tahun 2008 pada level 11.6 persen (yoy). Selain itu, tahun 2008 juga terjadi krisis global yang diakibatkan oleh terjadinya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat sehingga berdampak bagi negara-negara sedang berkembang seperti di Indonesia sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami gulung tikar. Pada tahun 2009, laju inflasi menunjukkan penurunan tajam ke level 2.78 persen (yoy), yang antara lain disebabkan karena penurunan harga komoditas energi internasional khususnya minyak mentah. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk menurunkan harga BBM pada akhir tahun 2009 sebagai kelanjutan dari penurunan harga BBM pada akhir tahun 2008. Meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional pada tahun 2010 kembali mendorong peningkatan laju inflasi hingga mencapai level 6.96 persen (yoy). Tekanan inflasi dari sumber eksternal tersebut memperberat laju inflasi domestik mengingat pada saat yang bersamaan, pasar dalam negeri juga mengalami gangguan

pasokan bahan pangan dan energi sebagai dampak dan serangkaian bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah sentra produksi. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010.

Pada tahun-tahun berikutnya laju inflasi dan IHK di Indonesia mengalami fluktuasi karena belum stabilnya perekonomian walaupun sudah berganti kepemimpinan presiden, dari masa orde baru ke masa reformasi. Adapun pada tahun tersebut perekonomian masih sering bergejolak seperti nilai tukar rupiah yang tidak stabil dan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi, bahkan bila dibandingkan dengan negara tetangga sekalipun seperti negara Malaysia. Akibat adanya inflasi yang cukup tinggi, keadaan ekonomi menjadi sulit ditebak. Hal ini juga menyebabkan kekhawatiran banyak kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah karena merekalah yang paling banyak merasakan dampak inflasi, seperti yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu.

Berdasarkan Baseline Scenario yang dilakukan Bank Indonesia 2006 diperoleh informasi bahwa dampak kenaikan BBM 2005 sebesar 10 persen telah meningkatkan inflasi sebesar 0,37 persen pada first round, dan 0,41 persen pada second round atau dengan total kenaikan inflasi sebesar 0,78 persen. Oleh karenanya, untuk mempertahankan tingkat daya

beli masyarakat, pemerintah memberikan subsidi BBM. Pemberian subsidi untuk BBM adalah sebuah subsidi konsumtif karena dampak dari subsidi ini berupa kenaikan konsumsi BBM masyarakat. Kita bisa melihat pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor non-niaga setiap tahun semakin meningkat. Pemberian subsidi dalam perekonomian bisa dibenarkan dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi. Syarat ini bisa dipenuhi dengan memberikan subsidi pada konsumsi maupun produksi. Keduanya bisa berdampak menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan harga BBM selalu menjadi pro kontra. Karena kenaikan ini jelas akan membebani masyarakat karena kenaikannya akan memicu inflasi. Selain akan membawa dampak ekonomis, hal ini juga akan memicu dampak-dampak sosial. Mengingat pertumbuhan ekonomi kita yang masih ditopang oleh konsumsi agregat, kenaikan harga jelas akan menurunkan tingkat konsumsi dan akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Bahan bakar minyak merupakan komoditas strategis yang digunakan di hampir seluruh proses produksi, dan BBM bukanlah variabel tunggal yang bersifat steril yang tidak mempengaruhi harga barang lain. Jika harga BBM naik, maka akan terjadi pula kenaikan harga pada bahan baku dan barang lain, kemudian *end user* lah yang akan menanggungnya. Kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi juga akan membawa dampak sosial yang tinggi yakni menurunnya daya beli masyarakat.

Dalam lingkup perekonomian suatu negara, dampak kenaikan harga minyak tergantung pada kebijakan yang dianutnya. Pada kebanyakan negara terutama negara maju dimana tingkat harga minyak dalam negeri telah mengikuti harga pasar internasional, dampak kenaikan tersebut akan secara langsung mempengaruhi harga minyak domestik. Di sisi lain, pada negara berkembang yang masih melakukan kebijakan subsidi BBM, kenaikan harga minyak dunia akan mempengaruhi besarnya subsidi yang diberikan, dan otomatis akan berpengaruh pada besarnya anggaran pemerintah.

Suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredam gejolak dalam arti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Pemerintah merupakan aktor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi. Pihak swasta biasanya mengalokasikan sumber daya yang dimiliki melalui mekanisme pasar, jika sistem pasar benar-benar efisien di dalam mengalokasikan sumber daya, maka peranan pemerintah terbatas, salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam private market (Samuelson dan Nordhaus, 2005). Pemerintah akan masuk dan menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar jika pihak swasta dan

individu-individu tidak bersedia memperbaiki keadaan dan mengeluarkan biaya.

Pemerintah dapat melakukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal, melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik.

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami

banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa orde lama yang belum membedakan antara anggaran belanja dengan penerimaan. Perbedaan antara anggaran belanja dengan penerimaan akan mempermudah mengetahui berapa besar anggaran belanja pemerintah untuk sektor publik. Sistem penyusunan yang berimbang dan dinamis didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU No.17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menandai dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah. Dan seiring dengan perkembangan perekonomian nasional, DPR RI sepakat membuat perubahan atas UU No 17 tahun 2003 tersebut, dimana saat ini masih dalam proses pembahasan di Badan Legislasi DPR RI.

Pengeluaran pemerintah atau disebut juga belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada saat sebelum diundangkannya UU No. 17/2003. UU ini

mengenalkan sistem unified budget sehingga tidak lagi ada perbedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan provinsi Papua.

Perubahan struktur anggaran dalam pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 2004 dimana tidak lagi memisahkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat dibagi kedalam delapan pos. Format baru APBN ini menggunakan rincian belanja negara menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, belanja subsidi dan lain-lain. Belanja negara menurut fungsi ini merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format lama yang merupakan rincian dari pengeluaran pembangunan per sektor.

Fungsi pemerintah menurut Dumairy (1996) adalah alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari

pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan kualitas modal manusia tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi pada sumber daya manusia. Perumahan dan transportasi merupakan barang publik yang dapat disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan perumahan yang layak akan membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Jaringan transportasi yang terintegrasi dengan baik akan melancarkan distribusi kegiatan ekonomi dan secara jangka panjang dapat menjadi media pemerataan pembangunan. Menurut Deni Friawan (2008) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan *Pertama* adalah ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. *Kedua*, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi. Ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Alasan *Ketiga* adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, infrastruktur dalam bentuk perumahan dan transportasi merupakan cukup penting untuk menunjang kehidupan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah untuk menjawab tujuan penelitian yang dirangkum sebagai berikut:

1. Hasil penelitian tentang pengaruh secara simultan atas inflasi, subsidi BBM dan anggaran infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya F hitung = 8,435, dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut $< 0,05$, yang berarti bahwa faktor-faktor yang berupa: Inflasi, Subsidi BBM dan Anggaran Infrastruktur, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variable Independen: Inflasi, Subsidi BBM, Anggaran Infrastruktur, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi terbukti.
2. Hasil penelitian tentang pengaruh secara parsial atas inflasi, subsidi BBM dan pembangunan infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengujiannya dilakukan melalui uji-t masing-masing, yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda. Hasil analisis parsial tersebut terlihat bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan. Variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan subsidi BBM dan anggaran infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

Persamaan Linear:			
Pertumbuhan Ekonomi		BBM	Anggaran Infrastruktur
	= 2,024 - 0,126 Inflasi + 3,343 Subsidi + 7,596		
t	(-3,505)	(4,003)	(3,263)
sig	(0,002)	(0,000)	(0,003)

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang berjudul : Pengaruh Inflasi, Subsidi BBM, dan Anggaran Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah agar terus meningkatkan koordinasi kebijakan antara kebijakan moneter, fiskal, dan sector riil baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
2. Untuk kondisi saat ini, subsidi BBM masih diperlukan. Karena subsidi BBM ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga produksi ikut meningkat, dengan demikian perekonomian akan turut tumbuh .
3. Anggaran infrastruktur harus terus ditingkatkan. Infrastruktur yang baik akan memudahkan proses distribusi dan proses produksi sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan yang berkeadilan, yaitu

pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemberian stimulus fiscal untuk mendukung pembangunan infrastruktur maka diperkirakan dapat memberikan kontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. Karena masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan untuk peneliti berikutnya agar lebih memperdalam kaitan subsidi BBM terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meneliti pemerataan subsidi BBM (berdasarkan klasifikasi penerima subsidi).

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, H. & Taylor, J. (2000). *Regional economic and policy* (3rd ed). Oxford: Blackwell Publishing.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2009). *Sumatera Selatan dalam Angka*. BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan,
- Behrman, J. & Birdsall, N. (1983). *The quality of schooling: Quantity alone is misleading*. *American Economic Review*. 73 (5), 928–946.
- Benhabib, J. & Spiegel, M.M. (1994). *The Role of human capital in economic development: Evidence from aggregate cross-country data*. *Journal of Monetary Economics*, 34(2), 143-173.
- Branson, W.H. & Litvack, J.M. (1981). *Macroeconomics*. (2nd ed). New York: Harper and Row Publishers.
- Brown, C. & Medoff, J. (1978). *Trade unions in the production process*. *Journal of Political Economy*, 86 (3): 355–377.
- Capello, R. (2007). *Regional economics*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Yogyakarta, 2011
- Islam, N. (1995). *Growth empirics: A panel data approach*. *Quarterly Journal of Economics*, 110, 1127–1170.
- Kasliwal, P. (1995). *Development economics*. Ohio: South Western College Publishing.
- Kementerian Keuangan (2012). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012*
- Koutsoyiannis, A. (1977). *Theory of econometrics: An introductory exposition of econometric methods*. London: MacMillan Press Ltd.
- Layard, P.R.G. & Saigal, J.C. (1966). *Educational and occupational characteristics of manpower: An international comparison*. *British Journal of Industrial Relations*, 4 (2), 222-266.
- Lucas, R.E. Jr. (1988). *On the mechanics of economic development*. *Journal of Monetary Economics*, 22 (1): 3-42.

- Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D.N. (1992). *A contribution to the empirics of economic growth*. Quarterly Journal of Economics, 107 (2), 407-437.
- Mankiw, Gregory.N, (2003), *Teori Makro Ekonomi*, alih bahasa : Imam Nurmawan, SE, editor : Wisnu C. Kristiadji, Erlangga, Jakarta.
- Miller, S.M. & Upadhyay, M.P. (2000). *The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity*. Journal of Development Economics, 63 (2), 399-423.
- Nafzinger, W. E. (1997). *The economics of development countries* (3rd ed). New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (1991). *Econometric model and economic forecast*. Singapore: McGraw-Hill International Edition.
- Romer, P.M. (1986). *Increasing returns and long-run growth*. Journal of Political Economy, 94 (5), 1002-1037.
- Statistik Indonesia 2012, *Data Mencerdaskan Bangsa*, Badan Pusat statistik, Agustus 2012.
- Stiglitz, J.E. (2001). *Development thinking at the millennium*. In. Pleskovic, B. and N. Stern (Eds.). Annual World Bank Conference on Development Economics 2000. The World Bank, Washington, D.C.
- Sulistyowati, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 6, Nomor 2, September 2010, 158-170
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). (2007). *Statistik sosial dan kependudukan Sumatera Selatan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Warta Anggaran, *Majalah Keuangan Sektor Publik*, Kementerian Keuangan, Edisi 24 tahun 2012

**DATA INFLASI TIAP KUARTAL
TAHUN 2005 - 2012**

NO.	TAHUN	KUARTAL	INFLASI (%) (y o y)
1	2005	I	8,81
2		II	7,42
3		III	9,06
4		IV	17,11
5	2006	I	15,74
6		II	15,53
7		III	14,55
8		IV	6,60
9	2007	I	6,52
10		II	5,77
11		III	6,95
12		IV	6,59
13	2008	I	8,17
14		II	11,03
15		III	12,14
16		IV	11,06
17	2009	I	7,92
18		II	3,65
19		III	2,83
20		IV	2,78
21	2010	I	3,43
22		II	5,05
23		III	5,80
24		IV	6,96
25	2011	I	6,65
26		II	5,54
27		III	4,61
28		IV	3,79
29	2012	I	3,97
30		II	4,53
31		III	4,31
32		IV	4,30

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS)

DATA REALISASI SUBSIDI BBM TAHUN 2005 - 2012

NO.	TAHUN	TOTAL BELANJA NEGARA (Triliun)	REALISASI SUBSIDI BBM (Triliun)	Prosentase Realisasi subsidi BBM thd Belanja Negara (%)	PDB (T)	REALISASI SUBSIDI BBM (% dari PDB)
1	2005	517,52	95,60	18,47	2.729,70	3,40
2	2006	699,10	64,20	9,18	3.338,20	1,92
3	2007	752,37	83,80	11,14	3.957,40	2,01
4	2008	989,49	139,10	14,06	4.954,00	3,00
5	2009	937,38	45,00	4,80	5.613,40	0,80
6	2010	1.056,51	82,40	7,80	6.422,90	1,32
7	2011	1.295,00	165,20	12,76	7.427,10	2,20
8	2012	1.548,30	137,40	8,87	8.241,90	1,60

Sumber :


 APBN


 Nota Keuangan,
 LKPP


 Data diolah


 BPS


 Data diolah

DATA REALISASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2005 - 2012

NO.	TAHUN	TOTAL BELANJA NEGARA (Triliun)	REALISASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR (Triliun)	Prosentase Realisasi Anggaran Infrastruktur thd Belanja Negara (%)	PDB (T)	REALISASI ANGGARAN INFRASTRUKTUR (% dari PDB)
1	2005	517,52	26,11	5,04	2.729,70	0,96
2	2006	699,10	54,00	7,72	3.338,20	1,62
3	2007	752,37	59,81	7,95	3.957,40	1,51
4	2008	989,49	78,66	7,95	4.954,00	1,59
5	2009	937,38	91,34	9,74	5.613,40	1,63
6	2010	1.056,51	99,37	9,41	6.422,90	1,55
7	2011	1.295,00	125,62	11,49	7.427,10	1,69
8	2012	1.548,30	161,47	11,25	8.241,90	1,96

Sumber :

APBN

Ditjen Anggaran,
Kemenkeu

Data diolah

BPS

Data diolah

RINCIAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2005 - 2012 (miliar rupiah)																	
Uraian	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN-P	Realisasi Sementara	APBN	APBN							
1. Kementerian Negara/Lembaga (Miliar Rupiah)	23.809,8	46.150,2	50.956,7	68.023,3	78.116,8	75.385,7	129.721,0	104.866,2	142.634,8								
1 Kementerian Pekerjaan Umum	13.328,9	19.186,7	22.769,5	30.670,0	40.082,7	32.107,9	56.535,3	50.393,2	62.563,1								
2 Kementerian Perhubungan	3.978,5	6.769,7	9.079,4	13.477,1	15.567,3	15.429,1	23.134,6	19.784,8	28.117,7								
3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.117,1	4.657,6	5.141,6	5.442,5	6.577,2	5.534,1	15.674,9	8.895,1	15.804,7								
4 Kementerian Dalam Negeri	637,6	1.158,0	3.118,2	5.303,0	8.315,1	13.403,3	16.792,7	12.815,2	17.134,4								
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.745,8	2.566,3	2.343,1	2.398,9	3.235,6	3.389,6	5.559,2	4.975,8	5.993,3								
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika	429,1	1.235,7	1.016,0	996,0	1.360,0	2.196,7	3.452,3	1.842,3	3.246,0								
7 Kementerian Negara Perumahan Rakyat	84,1	369,2	419,6	590,8	1.277,5	913,9	3.462,0	2.325,2	4.504,1								
8 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	73,9	230,2	384,8	919,4	931,2	1.040,0	1.263,4	1.005,8	1.018,3								
9 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	414,7	9.976,7	6.532,8	7.619,1	-	-	-	-	-								
10 Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana	-	-	46,7	94,5	104,4	239,4	938,9	1.147,2	995,1								
11 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-	113,9	513,0	795,8	636,9	1.286,1	571,0	1.906,9								
12 Badan SAR Nasional	-	-	-	-	-	512,6	1.329,2	1.041,5	1.111,7								
13 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	292,5	69,1	299,6								
14 Pengembangan Otorita Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0								
2. Non K/L (Miliar Rupiah)	2.304,3	7.853,4	8.857,8	10.633,9	13.227,6	23.985,2	22.051,7	20.756,7	18.837,5								
1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (<i>land capping</i>)	-	-	-	264,9	430,8	352,9	610,0	496,2	500,0								
2 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	-	2.000,0	2.000,0	-	500,0	3.610,5	4.571,6	4.571,6	6.006,9								
3 PSO	675,5	1.215,0	1.025,1	1.688,4	1.289,6	1.373,9	1.943,4	1.833,9	2.945,7								
4 Kredit Program KPRSH & Rusunami	110,1	252,0	300,0	800,0	774,8	416,0	696,2	611,8	-								
5 Dana Alokasi Khusus	1.518,7	3.811,4	4.782,7	6.550,5	7.192,2	4.493,1	6.051,0	6.051,0	6.327,4								
6 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur	-	575,0	750,0	330,0	2.070,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.000,0								
7 Dana Kontijensi PLN	-	-	-	-	-	-	889,0	-	623,3								
8 Dana Kontijensi PDAM	-	-	-	-	-	-	15,0	-	10,0								
9 Pinjaman pada PT PLN	-	-	-	-	-	7.500,0	-	-	-								
10 Dana Bergulir Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	2.300,0	3.850,0	3.850,0	900,0								
11 Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang	-	-	-	-	-	398,9	392,2	392,2	392,2								
12 Pengembangan Otorita Batam	-	-	-	-	-	140,0	140,0	140,0	140,0								
13 Merauke <i>Integrated Food and Energy Estate</i>	-	-	-	-	-	-	87,3	-	-								
14 PMN untuk PT SMI	-	-	-	1.000,0	-	1.000,0	-	-	-								
15 PMN untuk PT PII	-	-	-	-	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	-								
16 Pengembangan kawasan Bintan dan Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Total	26.114,2	54.003,6	59.814,4	78.657,2	91.344,4	99.370,9	151.772,7	125.622,8	161.472,3								

Lampiran 5

**DATA PERTUMBUHAN EKONOMI TIAP KUARTAL
TAHUN 2005 - 2012**

NO.	TAHUN	KUARTAL	PERTUMBUHAN EKONOMI (y o y) % PDB
1	2005	I	6,35
2		II	5,54
3		III	5,34
4		IV	3,16
5	2006	I	4,59
6		II	5,22
7		III	5,52
8		IV	6,10
9	2007	I	6,00
10		II	6,30
11		III	6,50
12		IV	6,30
13	2008	I	6,40
14		II	6,40
15		III	6,10
16		IV	5,20
17	2009	I	4,40
18		II	4,00
19		III	4,20
20		IV	5,40
21	2010	I	5,70
22		II	6,20
23		III	5,80
24		IV	6,90
25	2011	I	6,50
26		II	6,50
27		III	6,50
28		IV	6,50
29	2012	I	6,30
30		II	6,40
31		III	6,17
32		IV	6,30

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS)